**PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DAN REHABILITASI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

**(STUDI KASUS DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

Oleh

**MANGATUR SIRAIT**

21911012



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Peranan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)

Judul :

Nama : Mangatur Sirait

NPM : 21911012

Program Studi : Magister Hukum

Tanggal Lulus : 06 Mei 2023

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum

NIDN: 0029125702

Pembimbing II

Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H

NIDN: 0113028704

Mengetahui

Ketua Program Studi

Magister Hukum

Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H NIDN: 0113028704

**LEMBAR PENGESAHAN**

Peranan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)

Judul :

Nama : Mangatur Sirait

NPM : 21911012

Program Studi : Magister Hukum

Tanggal Lulus : 06 Mei 2023

Telah dipertahankan dan dilakukang sidang penguji

Pada tanggal 06 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

K e t u a

Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

NIDN: 0113028704

Anggota

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum Dr. Ariman Sitompul, SH, M.Hum

NIDN : 0119047902 NIDN : 0113028704

Penguji III

Mengetahui

Direktur Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum

NIDN: 0029125702

Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.H

NIDN : 0109027604

Telah Diuji pada :

Tanggal : 6 Mei 2023

TIM PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Anggota : 1. Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum

2. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

3. Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.H

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mangatur Sirait

NPM : 21911012

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Peranan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)

Judul :

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun ini tidak mengandung karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di suatu Perguruan Tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan tercantum dalam daftar pustaka.

Saya membuat pernyataan ini dengan sadar dan jujur, serta bersedia menerima sanksi hukum dan konsekuensi lain yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pernyataan ini.

Medan, 6 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan

Mangatur Sirait

**PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mangatur Sirait

NPM : 21911012

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Peranan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)

Judul :

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusive (Non Exclusive, Royalty Free Right) Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul :

Peranan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eskslusif ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 6 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan

Mangatur Sirait

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Data Pribadi** / *Personal Details*

Nama / *Name* : Mangatur Sirait

Alamat / *Address* : Mangaan I Link VI No. 140

Kode Post / *Postal Code* : -

Nomor Telepon / *Phone* : 081264440110

Email : -

Jenis Kelamin / *Gender*  : Laki-Laki

Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : Pematang Siantar, 12 Maret 1981

Status Marital / *Marital Status* : Kawin

Warga Negara / *Nationality* : Indonesia

Agama / *Religion* : Kristen

**Riwayat Pendidikan dan Pelatihan**

*Educational and Professional Qualification*

Jenjang Pendidikan

1. -

2. –

3 .-

4. S.1 Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa Tahun 06 Mei 2023

5. S.2 Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Tahun 2023

Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

1.

2.

**Riwayat Pengalaman Kerja**

*Summary of Working Experience*

1. Karyawan Samsat

2.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 6 Mei 2023

Mangatur Sirait

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul "Peranan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)" sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa.

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penulisan tesis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana sekaligus pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang berharga selama proses penulisan tesis ini.
2. Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister sekaligus pembimbing II, yang telah memberikan saran, masukan, dan bimbingan yang mendalam sehingga penulis dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini.
3. Dr. Azmiati Zuliah, S.H., M.H., selaku penguji, yang telah memberikan waktu, pengetahuan, dan masukan yang berharga dalam penilaian terhadap tesis ini.
4. Seluruh dosen-dosen Magister Hukum Universitas Dharmawangsa, yang telah memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam mengembangkan pemahaman di bidang hukum.
5. Kedua orang tua, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti dalam perjalanan studi penulis. Semua keberhasilan ini tidak akan terwujud tanpa kasih sayang, doa, dan pengorbanan mereka.
6. Istri tercinta, yang selalu memberikan dukungan, pengertian, dan semangat dalam menghadapi tantangan selama penulisan tesis ini. Keberadaanmu adalah sumber inspirasi dan motivasi penulis.
7. Anak-anak tercinta, yang menjadi sumber kebahagiaan dan semangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga masa depan yang cerah menantimu dan semakin menginspirasi penulis untuk terus belajar dan berkembang.
8. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kerjasama selama perjalanan studi ini. Kita telah berbagi pengalaman, ide, dan tawa, yang telah mewarnai masa-masa kuliah ini menjadi tak terlupakan.
9. Semua orang yang berkontribusi atas penyelesaian tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap dukungan, saran, dan kontribusi yang diberikan sangat berarti bagi penulis.

Terakhir, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, serta pengertian selama penulisan tesis ini. Segala upaya dan kontribusi yang telah diberikan telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan lebih baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik konstruktif dari semua pihak guna meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Semoga tesis ini juga dapat memberikan pandangan baru dan pemahaman yang lebih baik tentang peran penyidik dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba.

Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita.

**Medan, 06 Mei 2023**

**Penulis**

**Mangatur Sirait**

**21911012**

**DAFTAR ISI**

Hal

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR TANGGAL PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK i

ABSTRACT i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Perumusan Masalah 12
3. Tujuan Penelitian 13
4. Manfaat Penelitian 14
5. Keaslian Penelitian 15
6. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 17
7. Metode Penelitian 28
8. Sistematika Penulisan 34

BAB II PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DAN REHABILITASI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI POLRES PELABUHAN BELAWAN 36

1. Pengertian Restorative Justice dan Rehabilitasi 36
2. Peran Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* pada Korban Penyalahgunaan Narkoba 46
3. Peran Penyidik dalam Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba 53
4. Tantangan dan Peluang Penerapan Restorative Justice dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Polres Pelabuhan Belawan 61

BAB III IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DAN REHABILITASI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI POLRES PELABUHAN BELAWAN 70

1. Proses Implementasi Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Narkoba 70
2. Penilaian Hasil Implementasi *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Kasus Tindak Pidana Narkoba 79
3. Evaluasi Keberhasilan Implementasi *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Kasus Tindak Pidana Narkoba 82

BAB IV KENDALA PENYIDIK DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DAN REHABILITASI PADA PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI POLRES PELABUHAN BELAWAN 89

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kendala Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice dan Rehabilitasi 89
2. Strategi Penanganan Kendala dalam Penerapan Restorative Justice dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba 100
3. Peran Masyarakat dalam Mendukung Penerapan Restorative Justice dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Polres Pelabuhan Belawan 109

BAB V PENUTUP 123

1. Kesimpulan 123
2. Saran 124

DAFTAR PUSTAKA 127

**Peranan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi**

**pada Korban Penyalahgunaan Narkoba**

**(Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)**

**ABSTRAK**

**Mangatur Sirait, Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum,**

**Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang serius di Indonesia, termasuk di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Dalam upaya menangani dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, peran penyidik menjadi sangat penting dalam penerapan pendekatan *restorative justice* dan rehabilitasi terhadap korban. Penyidik bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti terkait kasus penyalahgunaan narkoba, namun mereka juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip *restorative justice* dan rehabilitasi. Dengan demikian, penyidik dapat berperan aktif dalam memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba, membangun hubungan yang lebih baik antara mereka, dan membantu korban untuk pulih secara fisik, mental, dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus tindak pidana narkotika dalam peraturan perundang-undangan, peran penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dan rehabilitasi di wilayah hukum Belawan, serta kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dan rehabilitasi di wilayah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang menggabungkan elemen hukum dan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan, menginterpretasi, dan merangkum data yang diperoleh.

Penyidik memiliki peran penting dalam penanganan kasus korban penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam penyelidikan, penyidikan, dan rehabilitasi. Implementasi restorative justice dan rehabilitasi di Polres Pelabuhan Belawan telah dilakukan, tetapi masih terdapat kendala seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik, minimnya dukungan dan fasilitas, serta kurangnya keterlibatan masyarakat. Diperlukan peningkatan pelatihan bagi penyidik dan kerjasama yang lebih kuat dengan masyarakat dan lembaga rehabilitasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci: *Penyalahgunaan Narkoba, Penyidik, Restorative Justice dan Rehabilitasi*

i

**ABSTRACT**

Drug abuse is a serious problem in Indonesia, including in the area of Pelabuhan Belawan Police Resort. In an effort to address the negative impacts caused by drug abuse, the role of investigators is crucial in the implementation of restorative justice and rehabilitation approaches for the victims. Investigators are responsible for conducting investigations and gathering evidence related to drug abuse cases, but they also need to have a deep understanding of the principles of restorative justice and rehabilitation. Consequently, investigators can actively facilitate meetings between the victims and drug abusers, build better relationships between them, and assist the victims in their physical, mental, and social recovery.

This study aims to examine the implementation of restorative justice and rehabilitation in drug-related criminal cases according to legislation, the role of investigators in applying restorative justice and rehabilitation in the Belawan jurisdiction, and the challenges faced by investigators in implementing restorative justice and rehabilitation in that area.

The research method used in this study is empirical juridical research that combines legal elements and scientific methods. This study employs a qualitative approach with data collection techniques through interviews and document studies. The data sources consist of primary data obtained through observation, interviews, and questionnaires, as well as secondary data derived from primary and secondary legal materials. Data analysis is performed descriptively by categorizing, interpreting, and summarizing the obtained data.

Investigators play a crucial role in handling cases of drug abuse, including investigation and rehabilitation. The implementation of restorative justice and rehabilitation in the Pelabuhan Belawan Police Resort has been carried out, but there are still challenges such as the lack of knowledge and skills among investigators, insufficient support and facilities, and limited community involvement. Enhancing training for investigators and strengthening collaboration with the community and rehabilitation institutions are necessary to improve the effectiveness of drug abuse prevention.

Keywords: Drug abuse, Investigators, Restorative justice and rehabilitation.

i

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perkara narkotika merupakan perkara yang tidak hanya dihadapi bangsa Indonesia, tetapi juga sudah menjadi perkara internasional dan menjadi kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Perkara narkotika menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara.[[1]](#footnote-1)

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat konsumsi narkotika yang cukup tinggi di dunia. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2021 terdapat sekitar 3.662.646 pengguna narkotika di Indonesia.[[2]](#footnote-2) Ironisnya, penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan kalangan generasi muda. Berdasarkan data dari kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.[[3]](#footnote-3) Sementara jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia menurut Indonesia Drugs Report 2022 adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8% dan dextro 6,4%.[[4]](#footnote-4)

Untuk mengantisipasi dan mempersempit ruang penyalahgunaan narkotika, pemerintahan Indonesia membentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), yaitu Badan Nasional Narkotika (BNN). Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.[[5]](#footnote-5) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh BNN semata, tetapi juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.[[6]](#footnote-6) Dalam hal ini, pihak kepolisian turut berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang masuk ke dalam penyakit masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Koordinasi antara BNN dan pihak kepolisian banyak menuai keberhasilan dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika. Sepanjang tahun 2021 saja, BNN dan Kepolisian berhasil mengungkap 28.938 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 53.405 orang. Provinsi Sumatera Utara menjadi penyumbang terbesar untuk kasus tindak pidana narkotika sebanyak 7.353 kasus.[[8]](#footnote-8) Bahkan, jika dipersempit, sepanjang tahun 2021 satuan reserse narkoba wilayah polres Belawan menangani 265 kasus.[[9]](#footnote-9)

Penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana narkotika selama ini cenderung lebih mengutamakan aspek hukuman atau retribusi. Hukuman yang diterapkan pada pelaku tindak pidana narkotika adalah hukuman penjara atau bahkan hukuman mati. Namun, pendekatan hukuman semata tidak selalu memberikan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana narkotika. Seringkali kita berpikiran bahwa saat berhadapan dengan perkara narkotika, sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi perkara narkotika. Tetapi, sistem peradilan pidana berbeda dengan hukum acara pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa lingkup hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana sangat berbeda. Hukum acara pidana hanya berkaitan dengan aspek hukumnya saja, sedangkan sistem peradilan pidana mencakup lebih dari itu, bahkan mencakup hal-hal yang bukan hukum.[[10]](#footnote-10)

Salah satunya terkait pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Pada perkembangannya, pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Salah satunya adalah masalah kelebihan daya tampung (*Overcrowding*). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, per tanggal 31 Maret 2020, jumlah tahanan dan warga binaan di seluruh Lapas dan Rumah Tahanan di Indonesia sebanyak 270.351 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas dan Rutan seluruhnya yang hanya 131.931 orang.[[11]](#footnote-11)

Upaya untuk mengatasi permasalahan *Overcrowding* tidak hanya berhenti pada urusan penambahan daya tampung Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan). Akan tetapi juga setidaknya bisa dimulai dari awal penegakan hukumnya dengan diterapkannya pendekatan *Restorative Justice* untuk perkara narkotika. Pendekatan ini terutama yang menyasar kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan menurut penulis bukanlah langkah yang tepat.

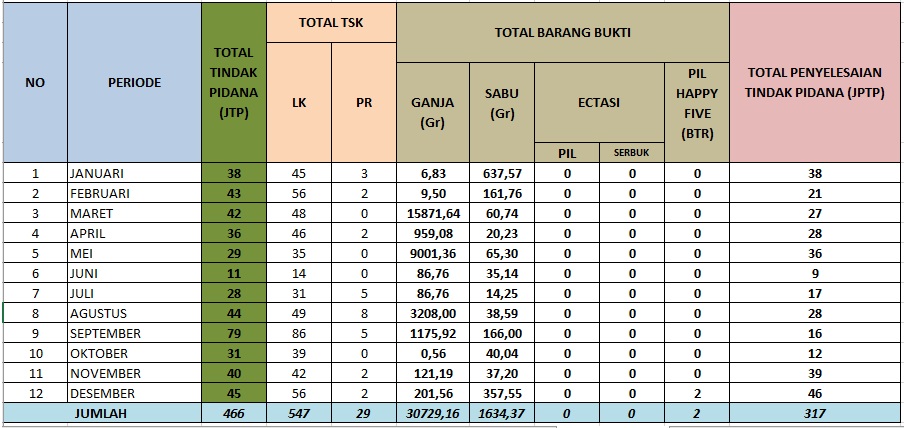
*Restorative justice* dan rehabilitasi adalah dua konsep yang dapat menjadi alternatif pendekatan dalam menangani kasus tindak pidana narkotika. Pendekatan *restorative justice* bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban atau masyarakat. Sedangkan rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat dengan membantu mereka mengatasi masalah ketergantungan narkotika.

*Restorative Justice* merupakan pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi *restorative justice* yang berisi prinsip- prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Di Polres Pelabuhan Belawan, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah utama yang perlu ditangani. Polres Pelabuhan Belawan merupakan wilayah yang strategis karena terdapat pelabuhan internasional yang menjadi pintu masuk barang-barang dari luar negeri. Karena itu, banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah ini. Jika dilihat dari data rekapitulasi tindak pidana narkoba di Polres Pelabuhan Belawan, maka tindak pidana narkoba cenderung mengalami kenaikan kurun waktu tahun 2018-2022. Kenaikan tindak pidana narkoba dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Data Rekapitulasi Tindak Pidana Narkoba Tahun 2018

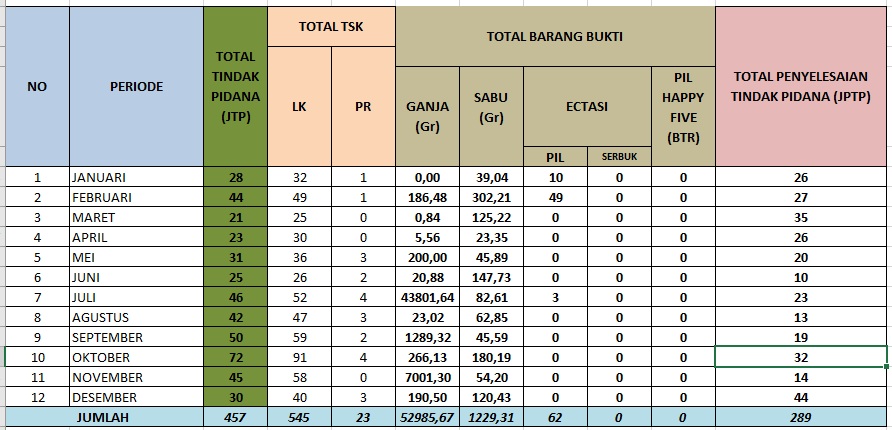
Jajaran Polres Pelabuhan Belawan



Sumber: Polres Pelabuhan Belawan

Data Rekapitulasi Tindak Pidana Narkoba Tahun 2019

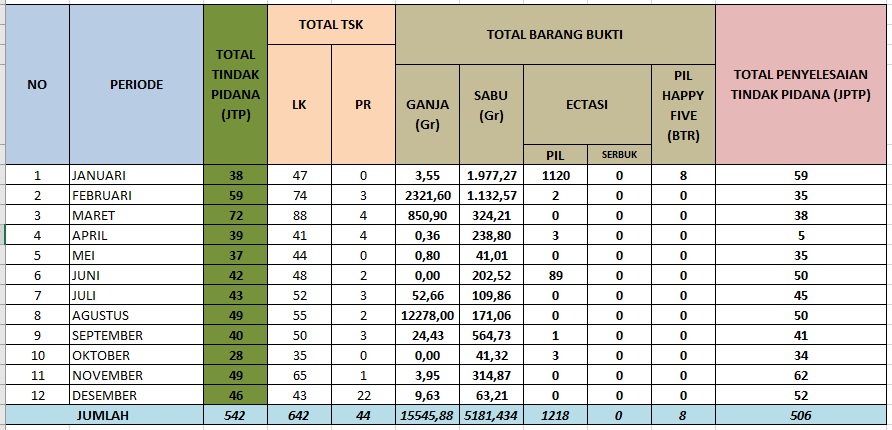
Jajaran Polres Pelabuhan Belawan



Sumber: Polres Pelabuhan Belawan

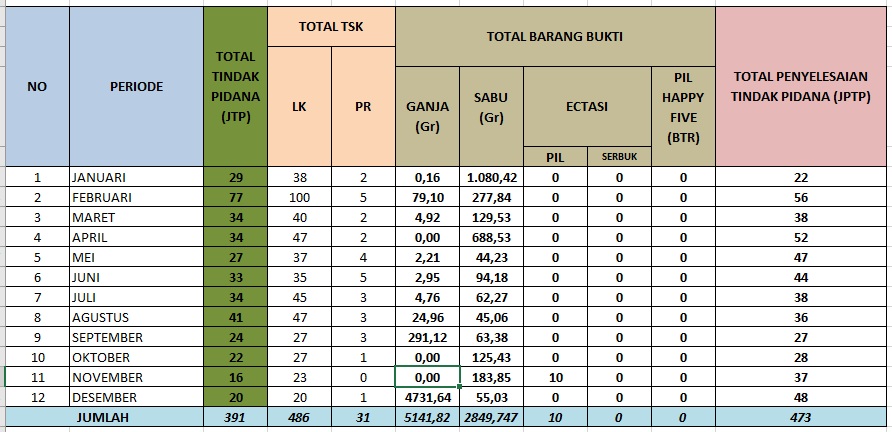
Data Rekapitulasi Tindak Pidana Narkoba Tahun 2020

Jajaran Polres Pelabuhan Belawan

  
Sumber: Polres Pelabuhan Belawan

Data Rekapitulasi Tindak Pidana Narkotika Tahun 2021

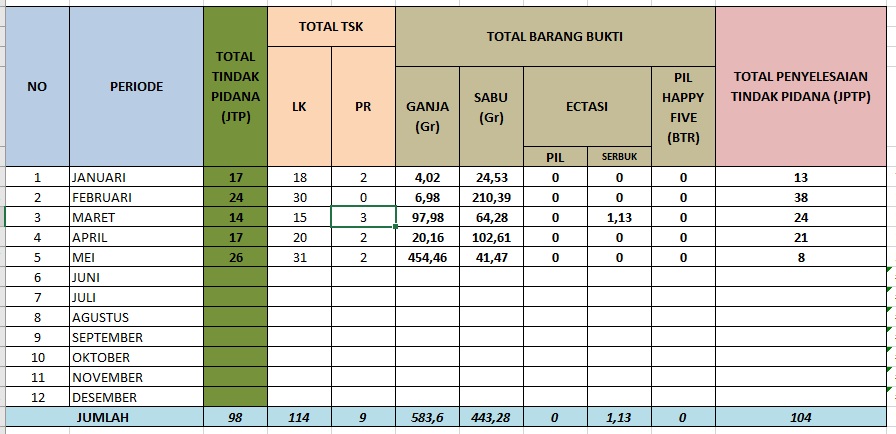
Jajaran Polres Pelabuhan Belawan



Sumber: Polres Pelabuhan Belawan

Data Rekapitulasi Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022

Jajaran Polres Pelabuhan Belawan



Sumber: Polres Pelabuhan Belawan

Berdasarkan data Rekapitulasi Tindak Pidana Narkoba Jajaran Polres Pelabuhan Belawan, terdapat kecenderungan peningkatan tindak pidana narkotika dari tahun 2018 hingga Mei 2022. Pada tahun 2018, jumlah tindak pidana narkotika sebanyak 466 dan meningkat menjadi 542 pada tahun 2020. Meskipun pada tahun 2021 jumlah tindak pidana narkotika mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 dari bulan Januari hingga Mei, jumlah tindak pidana narkotika kembali meningkat menjadi 98 kasus.

Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah tersangka yang ditangkap, di mana pada tahun 2018 terdapat 547 tersangka laki-laki dan 29 tersangka perempuan, dan meningkat menjadi 642 tersangka laki-laki dan 44 tersangka perempuan pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah tersangka laki-laki mengalami penurunan namun jumlah tersangka perempuan mengalami kenaikan. Sementara pada tahun 2022 dari bulan Januari hingga Mei, jumlah tersangka laki-laki kembali meningkat.

Penyelesaian tindak pidana juga menjadi perhatian, di mana pada tahun 2018 sebanyak 317 kasus berhasil diselesaikan dan pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah penyelesaian kasus menjadi 506. Namun, pada tahun 2019 dan 2021 jumlah penyelesaian kasus mengalami penurunan. Pada tahun 2022 dari bulan Januari hingga Mei, jumlah penyelesaian kasus sebanyak 104, yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Data Laporan Polisi Polres Pelabuhan Belawan

Tahun 2022-2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun 2022  (Januari-Juli) | | Tahun 2023  (Januari-Maret) | |
| Total LP | LP Pengguna (TAT) | Total LP | LP Pengguna (TAT) |
| 302 | 51 | 65 | 13 |

Sumber: Polres Pelabuhan Belawan

Berdasarkan data yang di atas, pada tahun 2022 terdapat total 302 laporan kepolisian terkait tindak pidana narkotika dan dari jumlah tersebut, sebanyak 51 laporan dipilih untuk diakomodasi melalui pendekatan *restorative justice*. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah laporan kepolisian menurun menjadi 65, dan sebanyak 13 laporan yang dipilih untuk diterapkan pendekatan *restorative justice*. Meskipun penurunan jumlah laporan kepolisian pada tahun 2023, jumlah laporan yang dipilih untuk *restorative justice* masih relatif stabil dengan persentase yang sama pada tahun 2022 dan 2023 yaitu sekitar 17%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkotika masih terus dilakukan dan memperoleh dukungan dari pihak penegak hukum.

Polres Pelabuhan Belawan merupakan salah satu kepolisian di Indonesia yang telah menerapkan pendekatan *restorative justice* dan rehabilitasi dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, terutama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* yang mensyaratkan penanganan tindak pidana dilakukan berdasarkan *restorative justice*. Pada Pasal 6 dan Pasal 7 dalam peraturan ini membahas tentang persyaratan formil dan khusus dalam penanganan tindak pidana yang meliputi perdamaian antara pelaku dan korban serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Namun, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa terdapat persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba.

Pasal 9 kemudian mengatur persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba, yang mencakup pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang narkoba atau hasil tes urine positif, tetapi tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar. Pelaku juga harus telah dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu dan bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Dalam konteks penanganan pecandu narkoba, terdapat konsep *restorative justice* dan rehabilitasi yang menjadi dasar hukum dalam Pasal 9. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihan masyarakat yang terkena dampaknya. Sedangkan rehabilitasi bertujuan untuk memberikan pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkoba agar dapat pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam hal ini, persyaratan khusus yang ditetapkan dalam Pasal 9 menunjukkan bahwa pemulihan dan rehabilitasi pecandu narkoba menjadi prioritas dalam penanganan tindak pidana narkoba. Melalui asesmen oleh tim asesmen terpadu, pelaku dapat diidentifikasi kondisi dan kebutuhan rehabilitasi yang tepat. Selain itu, pelaku juga harus bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri dalam melakukan penyelidikan lanjutan, yang dapat membantu dalam mencegah terulangnya tindakan penyalahgunaan narkoba di masa depan.

*Restorative justice* dan rehabilitasi diarahkan pada upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan pelaku narkoba ke dalam masyarakat. Persyaratan khusus yang ditetapkan dalam Pasal 9 diharapkan dapat membantu pecandu narkoba untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan yang tepat, sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Namun, penerapan pendekatan ini tidak dapat dilakukan dengan sendirinya. Dalam penerapannya, Polres Pelabuhan Belawan membutuhkan peran penyidik yang kuat dan terlatih untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan, peran penyidik menjadi sangat penting. Penyidik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengidentifikasi korban penyalahgunaan narkoba dan memahami kondisi mereka. Selain itu, penyidik juga harus mampu mengarahkan korban ke dalam program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk lebih memahami peran penyidik dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba, dilakukan studi kasus di Polres Pelabuhan Belawan. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai penerapan *restorative justice* dan rehabilitasidalam perkara narkotika di Indonesia di tingkat penyidikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya di atas khususnya di bidang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia. Sehingga berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas tuntas mengenai, “Peranan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)”.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan?
2. Bagaimana implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan?
3. Bagaimana kendala penyidik dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan?
4. **Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan para peneliti tidak hanya memberikan nilai manfaat bagi pengetahuan, tetapi juga memiliki tujuan yang sudah ditentukan sebelum penelitian dilakukan. Hal senada juga disebutkan oleh Bruggink bahwa hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*) merupakan tujuan dari penelitian.[[12]](#footnote-12) Sementara, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus tindak pidana narkotika dalam peraturan perundang-undangan;
2. Untuk mengetahui peran penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Belawan; dan
3. Untuk mengetahui kendala penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Belawan.
4. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori *Restorative Justice* dengan fokus pada peran penyidik dalam penerapan konsep ini pada korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang teori *Restorative Justice* dan memberikan pandangan baru dalam penerapannya dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan literatur tentang rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan fokus pada peran penyidik, sehingga dapat menjadi referensi bagi para peneliti dan praktisi yang tertarik dengan topik rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Terakhir, penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan tentang peran penyidik dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat membantu para peneliti dan praktisi untuk lebih memahami tugas dan tanggung jawab penyidik dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi pengembangan teori dalam konteks *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba, serta bagi para praktisi dalam upaya memberikan dukungan dan rehabilitasi yang lebih baik pada korban penyalahgunaan narkoba.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba. Penyidik dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk mengoptimalkan perannya dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi di lapangan, yang pada gilirannya dapat memperkuat kualitas penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu, studi ini juga memberikan pandangan baru tentang rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan fokus pada peran penyidik, yang dapat membantu memperkuat konsep rehabilitasi dan memberikan pandangan baru tentang cara terbaik untuk membantu korban dalam proses rehabilitasi. Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan memberikan panduan bagi pembuat kebijakan publik dalam mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Terakhir, penelitian ini dapat membantu meningkatkan hubungan antara penyidik dan korban dalam proses penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba.

1. **Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Sepengetahuan peneliti, tesis dengan topik peranan penyidik dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Belawan (Studi Kasus di Polres Belawan) belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya di Pascasarjana Universitas Dharmawangsa. Di luar itu, terdapat beberapa tesis yang membahas tema yang sama dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Mulyadi dengan judul tesis, “Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia”.
2. Khairunisa dengan judul tesis, “Peran Keluarga dalam Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba”
3. Heni Damayanti Siregar dengan judul tesis, “Dampak Program Restorative Justice pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

Adapun yang menjadi pembeda antara tesis peneliti dengan ketiga tesis tersebut di antaranya:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspek | "Peranan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba" | "Efektivitas *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia" | "Peran Keluarga dalam Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba" | "Dampak Program *Restorative Justice* pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga" |
| Fokus Penelitian | Peran penyidik dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba | Efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa perdata | Peran keluarga dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba | Dampak program *restorative justice* pada korban kekerasan dalam rumah tangga |
| Jenis Kasus | Kasus penyalahgunaan narkoba | Kasus sengketa perdata | Kasus penyalahgunaan narkoba | Kasus kekerasan dalam rumah tangga |
| Variabel Utama | Peran penyidik, *restorative justice*, rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkoba | Efektivitas *restorative justice*, penyelesaian sengketa perdata | Peran keluarga, proses rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkoba | Program *restorative justice*, dampak, korban kekerasan dalam rumah tangga |
| Temuan Utama | Pentingnya peran penyidik dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba | Efektivitas *restorative justice* dalam menyelesaikan sengketa perdata | Pentingnya peran keluarga dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba | Dampak positif program *restorative justice* pada korban kekerasan dalam rumah tangga |
| Implikasi | Meningkatkan peran penyidik dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba | Meningkatkan efektivitas *restorative justice* dalam menyelesaikan sengketa perdata | Meningkatkan peran keluarga dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba | Meningkatkan implementasi program *restorative justice* untuk korban kekerasan dalam rumah tangga |

Dari perbedaan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa tesis ini dijamin keasliannya, karena pembahasan dan kesimpulan dalam tesis ini akan membahas dari sudut pandang yang yang berbeda dari penelitian dengan tema yang sama, yaitu penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi untuk kasus penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan. Peneliti lebih menekankan pada aspek peranan penyidik dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika, termasuk kendala-kendala yang dihadapi penyidik saat penerapannya.

1. **Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**
2. **Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.[[13]](#footnote-13) Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.[[14]](#footnote-14)

Dalam kaitan ini, teori hukum yang dijadikan landasan teori untuk pemecahan masalah hukum konkret atau yang langsung diterapkan pada praktik hukum adalah pemikiran para teoretisi hukum yang telah diakui kebenarannya dari masa ke masa secara universal.[[15]](#footnote-15) Oleh karena itu, untuk menganalisa permasalahan dalam tulisan ini, peneliti menggunakan kerangka Teori Sistem Hukum dan Teori Efektivitas.

## Teori Sistem Hukum

Istilah sistem diadopsi dari bahasa Yunani, yakni *systema* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam- macam bagian.[[16]](#footnote-16) Kata “sistem” dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh.

Sedangkan definisi kata “hukum’ pada hakikatnya terjadi kesulitan dalam pendefinisiannya karena sesuatu yang abstrak meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Oleh karena itu pendefinisiannya beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.[[17]](#footnote-17)

John Austin[[18]](#footnote-18) menegaskan hukum adalah seperangkat perintah, baik yang langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi. Bagi kaum positivistis, hukum tidak lain perintah Negara yang bersanksi. Hukum hanyalah apa yang diproduk oleh Negara, yaitu hukum positif.

Ahli hukum lainnya, yaitu Gustav Radbruch[[19]](#footnote-19) menjelaskan bahwa hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu. Jadi, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur dan budaya hukum.

Lawrence Meir Friedman[[20]](#footnote-20) mengemukakan ada 3 (tiga) unsur sistem hukum. Ketiga unsur sistem hukum masing-masing:

* + 1. Struktur (*structure*) yaitu keseluruhan institusi - institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain - lain.
    2. Substansi (*substance*), yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
    3. Kultur hukum (*legal culture*), yaitu opini-opini, kepercayaan - kepercayaan (keyakinan - keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait dengan hukum.

Bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur dalam sistem hukum. Artinya penegakan akan berjalan secara maksimal bila aturan, institusi penegak hukum dan kultur hukumnya baik.

Soerjono Soekanto[[21]](#footnote-21) dalam naskah pidato pengukuhan Guru Besar Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang diucapkan pada tanggal 14 Desember 1983 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Penulis menggunakan teori sistem hukum dalam penelitian ini karena dapat membantu dalam memahami sistem hukum yang ada dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan. Teori sistem hukum dapat memperjelas struktur dan fungsi dari sistem hukum yang ada, termasuk peran penyidik dalam proses tersebut. Dengan memahami teori sistem hukum, peneliti dapat memahami proses *restorative justice* dan rehabilitasi di Polres Pelabuhan Belawan bekerja dan bagaimana peran penyidik di dalamnya. Hal ini dapat membantu dalam memberikan rekomendasi dan saran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba.

Top of Form

## Teori Efetivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.[[22]](#footnote-22)

Hans Kelsen[[23]](#footnote-23) memaparkan definisi efektivitas hukum yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dapat diukur berdasarkan perilaku masyarakat dalam menghindari sanksi yang diatur oleh norma hukum, serta apakah sanksi tersebut diterapkan dengan tepat dan proporsional sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

Anthony Allot[[24]](#footnote-24) menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat tercapai jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif dapat mewujudkan apa yang dirancang dan jika terjadi kegagalan, kemungkinan terjadi perbaikan secara mudah dengan menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda. Hukum memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kedua pandangan di atas, hanya menyajikan tentang konsep efektivitas hukum, namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektivitas hukum. Dengan melakukan sintesis terhadap kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum merupakan suatu kajian dan analisis terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum.[[25]](#footnote-25)

Mengutip Ensiklopedia administrasi,[[26]](#footnote-26) efektivitas dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu tindakan menghasilkan efek atau akibat yang diinginkan, ketika dilakukan oleh seseorang dengan maksud tertentu yang diharapkan. Oleh karena itu, seseorang dapat dianggap efektif jika tindakannya menghasilkan hasil yang diinginkan atau sesuai dengan tujuannya.

Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali[[27]](#footnote-27) berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Soerjono Soekanto[[28]](#footnote-28) mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum atau undang-undang dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi 2 (dua) macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara, sedangkan peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung yang berkecimpung dalam bidang bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai). Yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dan masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam konteks penegakan hukum erat kaitannya, di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Sedangkan faktor yang kelima dalam penegakan hukum, yaitu kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hasil, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[[29]](#footnote-29)

Penggunaan teori efektivitas hukum pada penelitian ini sangat relevan karena efektivitas penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil, cepat, dan tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, penggunaan teori efektivitas hukum dalam penelitian tersebut dapat membantu memahami sejauh mana efektivitas penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, termasuk faktor efektivitas hukum.

1. **Kerangka Konseptual**
2. Peranan

proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.[[30]](#footnote-30)

1. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[[31]](#footnote-31)

1. Penerapan

Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[[32]](#footnote-32)

1. *Restorative Justice*

*Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat.[[33]](#footnote-33)

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[[34]](#footnote-34)

1. Korban

Korban adalah seseorang atau kelompok orang yang menderita kerugian fisik, psikologis, atau ekonomi karena tindakan kriminal atau kejahatan, seperti kekerasan, pencurian, penipuan, narkoba atau diskriminasi.[[35]](#footnote-35)

1. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah tindakan atau kebiasaan menggunakan suatu zat, bahan, atau aktivitas secara berlebihan atau tidak tepat sehingga menimbulkan dampak negatif pada kesehatan, hubungan sosial, atau kinerja seseorang. Penyalahgunaan dapat merujuk pada berbagai hal seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol, obat-obatan, rokok, media sosial, game, dan sebagainya. Penyalahgunaan bisa bersifat fisik maupun psikologis, dan dapat berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Penyalahgunaan yang tidak diatasi dapat membawa dampak yang serius dan merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat.[[36]](#footnote-36)

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.[[37]](#footnote-37)

1. Polres Pelabuhan Belawan

Polres Pelabuhan Belawan adalah kepolisian resor yang bertanggung jawab atas wilayah hukum kepolisian di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Indonesia. Polres Pelabuhan Belawan berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya. Tugas utama Polres Pelabuhan Belawan antara lain melakukan patroli keamanan, mengumpulkan informasi intelijen, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, serta memberikan pelayanan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat. Polres Pelabuhan Belawan juga berperan aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.[[38]](#footnote-38)

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan elemen-elemen hukum (yuridis) dengan metode ilmiah (empiris) dalam melakukan penelitian. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan hukum dengan mengumpulkan data yang bersifat empiris, seperti data primer maupun sekunder, serta menganalisisnya secara kuantitatif maupun kualitatif.[[39]](#footnote-39) Dalam penelitian yuridis empiris ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui teknik wawancara dan studi dokumen, kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif.[[40]](#footnote-40)

Penelitian bersifat kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.[[41]](#footnote-41) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati, belajar, dan mengerti situasi dan aktivitas yang terjadi di lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung.[[42]](#footnote-42) Sumber data primer biasanya terdiri dari observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi fokus penelitian. Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan informan, sedangkan kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden.

1. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi, dokumen, atau data yang sudah diolah oleh lembaga atau instansi tertentu.[[43]](#footnote-43) Adapun sumber data sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan yang mengikat secara hukum. Sumber-sumber yang digunakan sebagai bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau laporan dalam proses perundang-undangan, dan keputusan hakim.[[44]](#footnote-44)

Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini dalam hal ini berupa peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum. Selain itu, dipergunakan pula beberapa ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Bahan hukum primer tesebut dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan penyusunan tesis ini.

Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; dan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
5. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang akan diolah dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

* 1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen berupa peraturan dalam fatwa yang terkait *human trafficking* lintas negara di Asia Tenggara. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat berbagai literatur berupa buku-buku, dokumen, tesis, skripsi, jurnal dan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode ini sebagai sarana untuk mendapatkan data-data terkait *human trafficking*, klarifikasi lapangan, dan pengambilan gambar-gambar yang dianggap perlu dalam penelitian.

* 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) melalui proses interaksi dan komunikasi. Wawancara artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.[[45]](#footnote-45) Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan. Adapun tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur (semistruktur). Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar atas permasalahan yang akan ditanyakan.[[46]](#footnote-46) Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.[[47]](#footnote-47)

Pada dasarnya, teknik analisis adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian, dilakukan analisis atau interpreatasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga akan memberikan gambaran hasil secara utuh.

1. Analisa Data

Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatianya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.[[48]](#footnote-48)

1. **Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 5 (lima) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual serta metode penelitian.

Bab II : Menjawab Permasalahan I

Bab kedua ini akan menjawab permasalahan pertama, yaitu berkaitan dengan penerapan prinsip *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus tindak pidana narkotika dalam peraturan perundang-undangan.

Bab III : Menjawab Permasalahan II

Sama halnya dengan Bab II, Bab III juga akan membahas permasalahan kedua yang berkaitan dengan peran penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Belawan.

Bab IV : Menjawab Permasalahan III

Pada Bab IV ini, peniliti akan menguraikan permasalahan ketiga yang berkaitan dengan kendala penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Belawan.

Bab V : Penutup

Pada bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

**BAB II**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DAN REHABILITASI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI POLRES PELABUHAN BELAWAN**

1. **Pengertian *Restorative Justice* dan Rehabilitasi**
2. Pengertian *Restorative Justice*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan dalam menangani tindak kejahatan yang berfokus pada korban. Pendekatan ini memungkinkan korban, pelaku kejahatan, keluarga mereka, dan wakil-wakil dari komunitas untuk menangani kerusakan yang disebabkan oleh tindak kejahatan.[[49]](#footnote-49)

Menanggapi pandangan tersebut, Daly menyatakan bahwa konsep Umbreit berfokus pada pemulihan kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Hal ini harus didukung oleh konsep restitusi, yaitu usaha untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh korban sebelumnya dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.[[50]](#footnote-50)

Tony Marshall menyatakan bahwa *restorative justice* sebenarnya adalah sebuah konsep penyelesaian tindak pidana yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut. Konsep ini mengarah pada usaha bersama untuk mencari solusi dan penyelesaian setelah terjadinya tindak pidana serta mengatasi implikasinya di masa depan. Oleh karena itu, pernyataan ini benar adanya.[[51]](#footnote-51)

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.[[52]](#footnote-52) Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.[[53]](#footnote-53)

Program *restorative justice* didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.[[54]](#footnote-54)

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.[[55]](#footnote-55)

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama- sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.[[56]](#footnote-56)

Setelah mempertimbangkan berbagai pandangan para ahli, peneliti dapat menentukan bahwa *restorative justice* pada dasarnya adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku dan korban tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik yang disetujui oleh semua pihak.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan.Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *restorative justice* memuat tentang konsep dan prinsip *restorative justice* yang dapat diterapkan dalam penanganan tindak pidana. *Restorative justice* diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik secara individual maupun sosial, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara.

Dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021, dijelaskan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan pada beberapa tahap penanganan tindak pidana, yaitu pada tahap pra-penuntutan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan. Tujuan dari penerapan *restorative justice* pada tahap-tahap tersebut adalah untuk mencapai keadilan yang adil dan memenuhi hak korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana.

Penanganan tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*, dilakukan beberapa langkah, antara lain pertama, melakukan pertemuan antara korban, pelaku, dan mediator yang ditunjuk oleh kepolisian. Kedua, memfasilitasi dialog dan negosiasi antara korban dan pelaku dengan tujuan mencari kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ketiga, menyepakati rencana aksi restoratif yang dilakukan oleh pelaku untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Keempat, memonitor dan mengevaluasi implementasi rencana aksi restoratif.

Dalam konteks penanganan penyalahgunaan narkoba, Pasal 9 mengacu pada konsep *restorative justice* dan rehabilitasi sebagai dasar hukum. *Restorative justice* memfokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihan masyarakat yang terkena dampaknya, sedangkan rehabilitasi bertujuan untuk memberikan pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkoba sehingga dapat pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

1. Pengertian Rehabilitasi

Menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk dipulihkan hak-haknya pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan jika ia ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan identitas atau kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga ia dapat dipulihkan kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabiliasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu warga binaan terlepas dari ketergatungan narkotika dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau *One Stop Center* (OSC).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan American association/APA (1992).[[57]](#footnote-57)

Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahguna narkotika bukan halyang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu:

* 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan(2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba:[[58]](#footnote-58)

* 1. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidak maupuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orangyang memiliki kepribadian introfet atau tertutup. Dengan jalan mengkomsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.
  2. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan degan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.
  3. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkotika hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkotika.

Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan. Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika,dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang popular dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peranserta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.[[59]](#footnote-59)

Terus meningkatnya jumlah korban penyalahguna narkotika membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkotika menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif.Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[[60]](#footnote-60)

Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan Peraturan-peraturan yang lain. Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh :[[61]](#footnote-61)

* 1. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.
  2. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.
  3. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakai jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabiltasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.[[62]](#footnote-62)

Penyalaguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, kaena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.[[63]](#footnote-63)

1. **Peran Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* pada Korban Penyalahgunaan Narkoba**

Penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menjadi semakin populer di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban dan hubungan antara pelaku dan korban setelah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan *retributive justice* yang lebih berfokus pada hukuman terhadap pelaku tindak pidana. *Restorative justice* mengutamakan pemulihan dan perdamaian, sementara *retributive justice* mengutamakan pemidanaan dan hukuman.[[64]](#footnote-64)

Menurut Pasal 14 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, secara umum peran penyidik kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* di antaranya adalah:[[65]](#footnote-65)

1. mengundang pihak-pihak yang berkonflik

Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk bertemu dan berdialog dengan tujuan mencapai kesepakatan dan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Undangan tersebut dapat berupa panggilan atau surat undangan secara resmi yang memuat waktu dan tempat pertemuan. Dalam hal ini, kepolisian harus bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Kepolisian harus berusaha memahami dan memfasilitasi masing-masing pihak untuk saling mendengarkan dan memahami masalah yang terjadi sehingga dapat mencapai kesepakatan yang baik.

1. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;

Setelah pihak-pihak yang berkonflik telah terkumpul, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi atau memediasi dialog antara pihak-pihak tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan damai. Kepolisian harus memperhatikan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian harus memastikan bahwa dialog berlangsung dengan adil dan terbuka sehingga semua pihak dapat memberikan pendapat mereka.

1. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan

Setelah proses mediasi selesai, kepolisian harus membuat laporan yang berisi hasil dari mediasi tersebut. Laporan ini harus mencakup kesepakatan yang telah dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Laporan ini dapat digunakan sebagai referensi oleh kepolisian dalam mengawasi dan memantau implementasi dari kesepakatan yang telah dicapai. Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan oleh pihak yang berkonflik sebagai bukti bahwa mereka telah mencapai kesepakatan damai dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

1. mencatat dalam buku register *restorative justice* pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

Selain membuat laporan, kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk mencatat hasil mediasi dalam buku register *restorative justice*. Buku register ini berfungsi untuk merekam semua kasus yang diatasi dengan pendekatan *restorative justice* oleh kepolisian. Dalam buku register ini, kepolisian harus mencatat secara lengkap dan rinci tentang kasus yang telah diatasi dengan pendekatan *restorative justice*, termasuk identitas pelaku, korban, serta kesepakatan yang telah dicapai. Selain itu, kepolisian juga harus mencatat apabila kasus tersebut dihentikan proses penyidikannya. Hal ini dimaksudkan agar kepolisian dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas dari penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan. Dengan begitu, kepolisian dapat mengukur seberapa efektif pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus dan memberikan alternatif bagi kebijakan kepolisian dalam menangani kasus-kasus kejahatan di masa depan.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, peran penyidik kepolisian, khususnya pada Polres Pelabuhan Belawan dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* menjadi sangat penting. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang tepat dalam penanganannya. Penerapan pendekatan *restorative justice* dapat membantu mengurangi angka kejahatan terkait narkoba dan juga membantu korban untuk pulih dari trauma yang dialaminya.

Terdapat 3 (tiga) peran penting penyidik Polres Pelabuhan Belawan dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* pada korban penyalahgunaan narkoba, yaitu upaya perdamaian di luar pengadilan, memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahan, dan menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.[[66]](#footnote-66)

* + 1. Upaya perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana

Upaya perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu bentuk penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum. Upaya ini bertujuan untuk membantu korban dan pelaku tindak pidana dalam memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan. Penyelesaian melalui upaya perdamaian di luar pengadilan juga dapat mengurangi beban kerja pengadilan yang sudah padat dengan berbagai kasus pidana.

Peran penyidik Polres Pelabuhan Belawan dalam upaya perdamaian di luar pengadilan adalah sebagai mediator antara korban dan pelaku tindak pidana. Penyidik akan memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku tindak pidana untuk membicarakan cara penyelesaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, penyidik akan mengajak korban dan pelaku tindak pidana untuk membuka diri dan saling mendengarkan satu sama lain.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, upaya perdamaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajak pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya terhadap korban. Pelaku tindak pidana juga dapat diminta untuk memberikan permintaan maaf kepada korban dan membantu korban dalam memulihkan diri dari dampak yang diakibatkan oleh tindakan pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, penyidik akan berperan sebagai mediator untuk membantu korban dan pelaku tindak pidana mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.[[67]](#footnote-67)

Upaya perdamaian di luar pengadilan tidak hanya memberikan manfaat bagi korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, penggunaan upaya perdamaian di luar pengadilan dapat membantu mengurangi beban kerja pengadilan, menghemat biaya pengadilan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan upaya perdamaian di luar pengadilan. Salah satunya adalah adanya potensi terjadinya manipulasi dan tekanan terhadap korban untuk menerima tawaran perdamaian dari pelaku tindak pidana. Karena itu, pengawasan dan pengendalian yang ketat dari pihak kepolisian dan lembaga lainnya dalam proses mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana sangat diperlukan.

* + 1. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahan dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan

Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahan dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan. Hal ini juga merupakan bagian dari pendekatan *restorative justice* yang bertujuan untuk memulihkan korban dan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana.[[68]](#footnote-68)

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pelaku tindak pidana dapat diminta untuk membayar ganti rugi kepada korban atas kerugian yang telah dialami akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kerugian yang dimaksud dapat berupa biaya pengobatan, kerusakan harta benda, atau bahkan kerugian nonmateriil seperti trauma atau kesulitan dalam menjalin hubungan sosial.

Penyidik Polres Pelabuhan Belawan akan berperan sebagai mediator dalam proses perundingan antara korban dan pelaku tindak pidana. Penyidik akan membantu menetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana dan memastikan bahwa kesepakatan tersebut adil bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat memberikan kontribusi positif terhadap korban dan masyarakat dengan membayar ganti rugi atas tindakan pidana yang dilakukannya. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan poin kedua ini. Salah satunya adalah adanya kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana tidak m mampu membayar ganti rugi yang telah ditetapkan, baik karena keterbatasan finansial atau karena tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat dari pihak kepolisian dan lembaga lainnya dalam proses perundingan antara korban dan pelaku tindak pidana.[[69]](#footnote-69)

* + 1. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak

Penyelesaian permasalahan hukum pidana yang terjadi di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana terjadi apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak. Hal ini juga merupakan bagian dari pendekatan *restorative justice* yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana serta memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, penyelesaian permasalahan hukum pidana dapat dilakukan dengan cara mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku tindak pidana. Kesepakatan tersebut dapat berupa permintaan maaf, pembayaran ganti rugi, atau tindakan lain yang dianggap tepat oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, penyidik Polres Pelabuhan Belawan akan berperan sebagai mediator dan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.[[70]](#footnote-70)

Dalam proses penyelesaian permasalahan hukum pidana, penyidik Polres Pelabuhan Belawan harus memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak melanggar hukum dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, penyidik juga harus memastikan bahwa korban tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan poin ketiga ini. Salah satunya adalah adanya kemungkinan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak adil bagi korban atau pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat dari pihak kepolisian dan lembaga lainnya dalam proses mediasi dan perundingan antara korban dan pelaku tindak pidana.

1. **Peran Penyidik dalam Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba**

Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) dari Undang-Undang Narkotika menjelaskan tentang dua jenis pecandu narkotika yaitu pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan pecandu narkotika yang tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Pasal 103 UU Narkotika menjelaskan bahwa pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi vonis atau hukuman oleh hakim, sedangkan pecandu narkotika yang tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika tidak akan dijatuhi vonis atau hukuman oleh hakim. Penetapan hakim ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa meskipun pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, mereka masih harus menjalani pengobatan dan perawatan.[[71]](#footnote-71)

Surat Edaran dari Mahkamah Agung tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011, perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau penetapan pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih dalam proses penyidikan atau penuntutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Pasal 13 ayat (2) juga menegaskan bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial berlaku bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau penetapan pengadilan jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat diperintahkan oleh pengadilan, baik itu bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika maupun bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Hakim harus memperhatikan dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terkait dengan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, tahap rehabilitasi hanya dapat ditentukan melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 127 (1), yang mempertimbangkan unsur pertanggungjawaban pidana yaitu actus reus dan mens rea. Pasal 127, Pasal 54, dan Pasal 103 UU Narkotika menyatakan bahwa pengguna narkotika dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Berdasarkan SEMA RI No 4 Tahun 2010 dan Pasal 103, Hakim berwenang menempatkan pecandu narkotika di lembaga rehabilitasi.

Rehabilitasi sebagai proses pemulihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan rehabilitasi termasuk tempat pengobatan, memutus mata rantai peredaran narkoba, tempat isolasi dari pengaruh lingkungan, serta bentuk pidana yang humanis. Namun, kekurangan rehabilitasi antara lain adalah menjadi tempat perlindungan bagi mafia narkoba, tidak adanya kriteria baku untuk lamanya rehabilitasi, insiden kekambuhan yang masih tinggi, dan tidak menangani akar masalah. Oleh karena itu, penentuan tahap rehabilitasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan pemulihan yang efektif bagi mereka yang benar-benar tergantung pada narkoba.[[72]](#footnote-72)

Dalam pelaksanaan rehabilitasi, Pasal 97 ayat (2) KUHAP menetapkan bahwa "rehabilitasi harus diberikan dan dicantumkan dalam putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1)." Tahap rehabilitasi ini dapat ditetapkan melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa orang yang terperangkap dalam penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melanggar hukum, yang saat ini sedang diproses dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, harus diberikan perawatan dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi.

Penjelasan mengenai rehabilitasi medis terdapat pada Pasal 1 angka 16 UU Narkotika, menentukan bahwa: “Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”. Penjelasan mengenai rehabilitasi sosial terdapat pada Pasal 1 angka 17 UU Narkotika, menentukan bahwa: “Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan bagi pelaku maupun korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jonkers menjelaskan bahwa sanksi pidana digunakan untuk menindak kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan bertujuan untuk memperbaiki sosial dan rehabilitasi.[[73]](#footnote-73)

Dalam Undang-Undang narkotika, salah satu sanksi yang diterapkan adalah sanksi tindakan atau *maatregel* yang berupa rehabilitasi. Menurut Sholehuddin, sanksi tindakan memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan efektivitas dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Konsep *double track system* yang digunakan dalam menangani masalah narkotika, di mana sanksi tindakan dan sanksi pidana diberlakukan secara seimbang, menjadi dasar pemikiran dalam hal ini.[[74]](#footnote-74)

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang Narkotika tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, yang telah tertuang dalam konsideran Undang-Undang Narkotika yang terdapat 6 butir yaitu:

1. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
2. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelyanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika;
3. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
4. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika Tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia;
5. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika.

Pasal 103 ayat (1) dan (2) UU Narkotika menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan oleh hakim dihitung sebagai masa menjalani hukuman.[[75]](#footnote-75)

Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) UU Narkotika mengatur tentang pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan pecandu narkotika yang tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Definisi pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 103 UU Narkotika yang menyatakan bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Sedangkan, pecandu narkotika yang tidak terbukti melakukan tindak pidana tidak dijatuhi vonis (hukuman) oleh hakim, namun masih wajib menjalani pengobatan dan perawatan. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa meskipun tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika, pecandu narkotika tetap harus menjalani pengobatan dan perawatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menetapkan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat diberikan jika terdapat putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau penetapan pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih dalam proses penyidikan atau penuntutan. Meskipun demikian, merujuk pada Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, rehabilitasi dapat diajukan oleh pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebelum ada putusan pengadilan.

Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba berdasarkan *restorative justice* yang mencakup kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar tersangka dapat mengajukan rehabilitasi. Persyaratan-persyaratan tersebut mencakup, antara lain, pelaku harus bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan, telah dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu, dan tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar.

Peran penyidik dalam rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba sangat penting, karena penyidik memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan menentukan apakah seseorang memenuhi persyaratan untuk mengajukan rehabilitasi. Dalam konteks Pasal 9, penyidik harus bekerja sama dengan pelaku yang bersedia untuk melakukan penyelidikan lanjutan, sehingga dapat menentukan apakah pelaku memenuhi persyaratan untuk mengikuti rehabilitasi. Selain itu, tim asesmen terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus melibatkan penyidik untuk memberikan masukan dan saran tentang kondisi pelaku yang akan direhabilitasi.[[76]](#footnote-76)

1. **Tantangan dan Peluang Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Polres Pelabuhan Belawan**

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba terbilang cukup tegas. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak ataupun sudah melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan **narkotika** golongan I akan memperoleh pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dengan jumlah denda 1 miliar hingga 10 miliar.

Kebijakan tegas ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Namun, pada saat yang sama, kebijakan ini juga memberikan dampak yang signifikan bagi para korban penyalahgunaan narkoba, terutama mereka yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pelabuhan Belawan.

Pelabuhan Belawan merupakan salah satu pintu masuk utama untuk barang-barang impor dan ekspor di Indonesia, termasuk narkoba. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Pelabuhan Belawan meningkat drastis. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup efektif dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, Polres Pelabuhan Belawan perlu mencari solusi alternatif untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satu solusi alternatif yang dapat diterapkan adalah *restorative justice*.

*Restorative justice* adalah sebuah pendekatan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan antara para korban, pelaku, dan masyarakat setelah terjadinya suatu tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan kembali antara para korban dan pelaku, serta memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan pidana tersebut.[[77]](#footnote-77)

Penerapan *restorative justice* pada kasus penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan akan memberikan beberapa tantangan dan peluang, di antaranya adalah sebagai berikut:[[78]](#footnote-78)

Tantangan:

1. Stigma terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *restorative justice* pada korban penyalahgunaan narkoba adalah stigma yang terkait dengan keadaan mereka. Korban penyalahgunaan narkoba seringkali dianggap sebagai orang yang buruk dan patut disalahkan atas tindakan mereka sendiri. Stigma ini dapat menyulitkan dalam membangun kembali kepercayaan antara para korban dan masyarakat setempat.

1. Kurangnya dukungan dari masyarakat.

Masyarakat setempat mungkin tidak sepenuhnya mendukung penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang apa itu *restorative justice* dan bagaimana pendekatan ini dapat memberikan manfaat bagi para korban dan masyarakat. Oleh karena itu, Polres Pelabuhan Belawan perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

1. Keterbatasan sumber daya.

Penerapan *restorative justice* memerlukan sumber daya yang cukup, baik itu dari segi tenaga, waktu, dan anggaran. Di Polres Pelabuhan Belawan yang memiliki keterbatasan sumber daya, hal ini dapat menjadi sebuah tantangan dalam implementasi *restorative justice* pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

1. Kerumitan dalam melibatkan pelaku.

Pendekatan *restorative justice* membutuhkan partisipasi dari pelaku dalam upaya membangun kembali kepercayaan antara para korban dan pelaku. Namun, pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, pelaku seringkali tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam pendekatan ini karena alasan-alasan tertentu, seperti takut dihukum atau tidak peduli dengan keadaan para korban.

Peluang:

1. Meningkatkan kesadaran tentang dampak penyalahgunaan narkoba.

Penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba pada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan *restorative justice*, masyarakat akan lebih memahami bahwa korban penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban dari kejahatan tersebut.[[79]](#footnote-79)

1. Membangun kembali hubungan antara para korban dan pelaku.

Pendekatan *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan hubungan antara para korban dan pelaku setelah terjadinya suatu tindak pidana. Dengan membangun kembali hubungan ini, para korban dan pelaku dapat merasakan rasa keadilan dan perdamaian, serta dapat menghindari konflik yang lebih besar di masa depan.

1. Memberikan solusi alternatif yang lebih efektif.

Penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dapat memberikan solusi alternatif yang lebih efektif dalam menangani permasalahan ini. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi tingkat *recidivism* (pengulangan tindak pidana) pada pelaku penyalahgunaan narkoba, serta dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

1. Memperkuat kolaborasi antara Polres dan masyarakat.

Penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dapat memperkuat kolaborasi antara Polres dan masyarakat dalam menangani permasalahan ini. Melalui pendekatan *restorative justice*, Polres Pelabuhan Belawan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan solusi yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih baik antara Polres dan masyarakat.

1. Mengurangi beban kerja sistem peradilan.

Penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dapat membantu mengurangi beban kerja sistem peradilan yang sudah sibuk dengan kasus-kasus lain. Pendekatan ini dapat membantu mempercepat proses penyelesaian kasus dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh sistem peradilan.[[80]](#footnote-80)

1. Meningkatkan kepuasan korban.

Pendekatan *restorative justice* dapat membantu meningkatkan kepuasan korban dalam proses penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan ini, korban dapat merasakan keadilan dan mendapatkan solusi yang lebih baik untuk kasus yang mereka alami.

1. Menjadikan Polres Pelabuhan Belawan sebagai contoh dalam penerapan *restorative justice*.

Jika Polres Pelabuhan Belawan berhasil dalam penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, maka Polres ini dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam penerapan pendekatan ini. Hal ini dapat membantu memperkuat sistem peradilan yang lebih adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, termasuk di Pelabuhan Belawan. Polres Pelabuhan Belawan merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Namun, penanganan kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya selesai dengan penangkapan pelaku dan penjatuhan hukuman, melainkan juga memerlukan upaya rehabilitasi agar korban dapat kembali hidup normal dan produktif.

Penerapan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan rehabilitasi. Terkadang, polisi harus mengirimkan korban ke tempat rehabilitasi di luar kota, yang membuat proses rehabilitasi menjadi sulit dan tidak efektif. Selain itu, kurangnya dukungan dan peran aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi juga menjadi kendala. Beberapa masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka tidak ingin berinteraksi dan membantu dalam proses rehabilitasi.[[81]](#footnote-81)

Selain itu, penerapan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan juga dihadapkan pada kendala dalam hal sumber daya manusia. Tidak semua petugas kepolisian memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dalam melakukan rehabilitasi. Padahal, proses rehabilitasi memerlukan keahlian khusus dan pemahaman yang baik terhadap kondisi korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, minimnya jumlah petugas yang terlibat dalam proses rehabilitasi juga menjadi kendala, sehingga proses rehabilitasi menjadi lambat dan kurang efektif.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, penerapan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan juga memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas proses rehabilitasi. Salah satu peluang tersebut adalah adanya kerja sama antara Polres Pelabuhan Belawan dan lembaga rehabilitasi yang ada di wilayah tersebut. Dengan adanya kerja sama ini, proses rehabilitasi menjadi lebih terkoordinasi dan efektif. Selain itu, kerja sama dengan masyarakat dan lembaga terkait lainnya juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi.

Peluang lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlib ai dalam proses rehabilitasi. Polres Pelabuhan Belawan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada petugas kepolisian yang terlibat dalam proses rehabilitasi, sehingga mereka memiliki kualifikasi dan pemahaman yang lebih baik dalam melakukan rehabilitasi. Selain itu, Polres Pelabuhan Belawan juga dapat memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses rehabilitasi.

Selain itu, penting bagi Polres Pelabuhan Belawan untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis dalam proses rehabilitasi. Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya dianggap sebagai pelaku kejahatan, namun juga sebagai korban yang memerlukan bantuan dan dukungan untuk kembali hidup normal dan produktif. Dalam hal ini, polisi dapat memberikan pendekatan yang lebih empati dan berbasis hak asasi manusia dalam proses rehabilitasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses rehabilitasi, Polres Pelabuhan Belawan juga perlu mengembangkan program rehabilitasi yang lebih inovatif dan berbasis riset. Program rehabilitasi harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik korban penyalahgunaan narkoba di wilayah Pelabuhan Belawan. Oleh karena itu, Polres Pelabuhan Belawan perlu melakukan penelitian dan evaluasi secara berkala terhadap program rehabilitasi yang telah dijalankan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan program yang lebih baik dan efektif.

Selain pengembangan program rehabilitasi, Polres Pelabuhan Belawan juga perlu memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan upaya yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Polres Pelabuhan Belawan dapat melakukan berbagai kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba, seperti penyuluhan dan kampanye anti narkoba di sekolah-sekolah dan masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Terakhir, penting bagi Polres Pelabuhan Belawan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya penerapan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba. Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga rehabilitasi, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya dapat membantu dalam memperkuat program rehabilitasi dan meningkatkan efektivitas proses rehabilitasi.

**BAB III**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DAN REHABILITASI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI POLRES PELABUHAN BELAWAN**

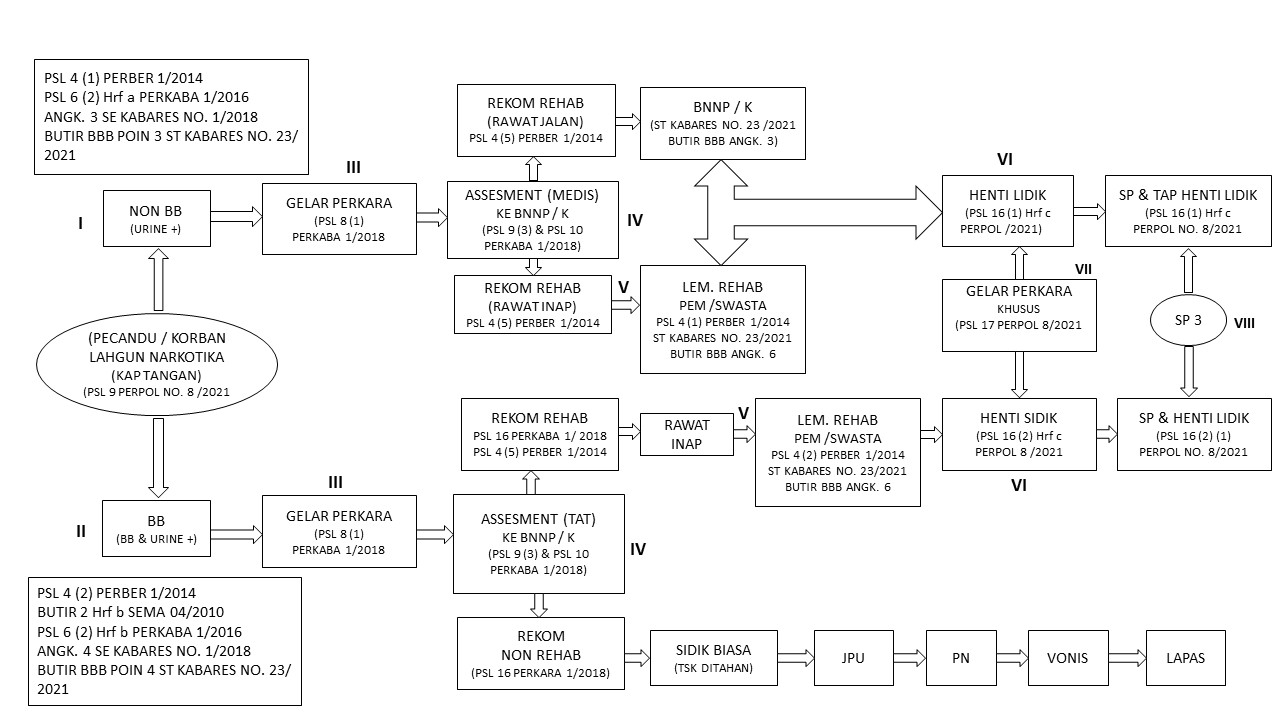
1. **Proses Implementasi *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Kasus Tindak Pidana Narkoba**

*Restorative justice* adalah suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa yang menekankan pada pemulihan hubungan dan pengembalian kerugian yang timbul akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam proses implementasi *restorative justice* pada kasus narkoba.

Proses implementasi *restorative justice* terhadap pencandu atau korban penyalahgunaan narkotika bergantung pada kondisi apakah dia tertangkap dengan barang bukti dan hasil tes urine yang positif. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam menentukan langkah selanjutnya bagi pihak berwenang, apakah akan memproses mereka sebagai tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkotika, ataukah memasukkannya ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah atau swasta setelah dilakukan asesmen terpadu. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang lebih efektif bagi mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika.

Berikut ini adalah langkah-langkah implementasi *restorative justice* pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan:[[82]](#footnote-82)

Implementasi *Restorative Justice* Tindak Pidana Narkotika

(Perpol Nomor 8 Tahun 2021)

Sumber: Polres Pelabuhan Belawan

1. Non Barang Bukti dan Urine +

Jika seseorang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian karena dugaan penyalahgunaan narkotika dan tidak memiliki barang bukti yang cukup untuk mendukung dugaan tersebut, namun tes urine menunjukkan hasil positif, maka orang tersebut masih dapat dijerat dengan tindakan hukum. Pasal 127 UU Narkotika menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika akan dikenakan hukuman penjara maksimal 4 tahun, 2 tahun, atau 1 tahun tergantung pada jenis narkotika yang digunakan. Namun, dalam hal pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika tertangkap tangan tanpa barang bukti tetapi dengan hasil tes urine yang positif, maka Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa mereka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain itu, Pasal 55 UU Narkotika menjelaskan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan untuk pecandu narkotika yang sudah cukup umur, mereka harus melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 103 UU Narkotika juga menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memerintahkan mereka untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau jika tidak terbukti bersalah, maka hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan mereka menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Sementara itu, PP No. 25 Tahun 2011 mengatur bahwa pecandu narkotika yang telah melaksanakan wajib lapor harus menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi yang ditetapkan. Kewajiban tersebut juga berlaku untuk pecandu narkotika yang diperintahkan menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial oleh pengadilan baik karena terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Selain itu, dalam hal pecandu narkotika sedang menjalani proses peradilan, mereka dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rekomendasi dari tim dokter. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Pasal 4 Ayat (1) Perber No. 1 Tahun 2014 berisi tentang tindakan yang dapat diambil terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap tetapi tidak memiliki barang bukti narkotika, namun dinyatakan positif menggunakan narkotika melalui tes urine, darah atau rambut. Menurut pasal ini, mereka dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah. Namun, sebelum di tempatkan ke lembaga rehabilitasi tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium yang menunjukkan hasil tes urine, darah atau rambut positif menggunakan narkotika. Kedua, harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik untuk menunjukkan bahwa orang tersebut telah ditangkap karena penyalahgunaan narkotika. Ketiga, harus dilengkapi dengan surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.

Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang dibentuk untuk menilai kondisi dan kebutuhan rehabilitasi dari pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Tim ini terdiri dari Tim Hukum Kepolisian, BNN, Kejaksaan, dan Dokter Psikologi. Surat hasil asesmen dari tim ini akan menunjukkan apakah orang tersebut memerlukan rehabilitasi medis atau sosial. Dalam hal ini, langkah yang diambil oleh pemerintah adalah memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Namun, mereka harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan tersebut.

Pasal 16 Perpol Nomor 8 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam kegiatan Penyelidikan, penyidik akan melakukan beberapa tindakan berdasarkan surat permohonan yang diterima. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum, pencatatan pada buku register *restorative justice* Penghentian Penyelidikan, dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Format surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan, serta Buku Register *restorative justice* Penghentian Penyelidikan/Penyidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini. Tindakan-tindakan tersebut juga berlaku pada kegiatan Penyidikan dengan tambahan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara. Selain itu, penyidik juga harus mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada jaksa penuntut umum dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

1. Barang Bukti dan Urine +

Jika seseorang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dengan adanya barang bukti yang cukup dan hasil tes urine yang positif, maka orang tersebut dapat dijerat dengan sanksi pidana yang lebih berat. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika atau zat adiktif sejenis, dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Perber No. 1 Tahun 2014 adalah suatu peraturan yang menetapkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tertangkap atau ditangkap tangan dengan jumlah barang bukti tertentu, baik dengan atau tanpa adanya narkotika dalam tubuhnya yang dapat terdeteksi melalui tes urine, darah, rambut, atau DNA selama proses peradilan mereka, dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah untuk masa waktu tertentu, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN serta dilengkapi dengan surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.

Pasal 4 Ayat (2) dari peraturan ini membahas mengenai tindakan yang harus diambil terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tertangkap atau ditangkap tangan. Pertama-tama, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah seseorang yang mengalami ketergantungan atau kecanduan pada narkotika, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang menggunakan narkotika dengan cara yang salah atau tidak benar, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan kehidupan mereka.

Pasal 4 Ayat (2) Perber No. 1 Tahun 2014 menetapkan bahwa jika seseorang yang diduga sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti tertentu, baik dengan atau tanpa adanya narkotika dalam tubuhnya yang dapat terdeteksi melalui tes urine, darah, rambut, atau DNA, maka mereka dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah selama masa proses peradilan.

Lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dimaksud adalah tempat yang menyediakan perawatan medis dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang memadai untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Namun, untuk dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, terlebih dahulu harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN, serta dilengkapi dengan surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan untuk menempatkan seseorang di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah adalah benar dan didasarkan pada hasil tes dan asesmen yang valid.

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dibuat berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut, atau DNA yang dilakukan pada seseorang yang diduga sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Berita Acara Pemeriksaan ini memuat hasil tes yang dilakukan dan dapat digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan. Sementara itu, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN dibuat oleh penyidik Badan Narkotika Nasional setelah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Berita Acara Pemeriksaan ini memuat informasi mengenai penangkapan atau penangkapan tangan, jenis dan jumlah barang bukti yang ditemukan, serta tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik BNN.

Selain itu, untuk memastikan bahwa keputusan untuk menempatkan seseorang di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah adalah tepat dan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan mereka, maka dilakukan juga asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari tim hukum kepolisian, BNN, kejaksaan, dan psikolog yang akan melakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan dan kebutuhan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Asesmen ini bertujuan untuk menentukan jenis dan metode rehabilitasi yang paling tepat untuk mereka, seperti terapi obat, terapi perilaku kognitif, dan terapi kelompok. Hal ini penting dilakukan agar proses rehabilitasi dapat berjalan efektif dan memperoleh hasil yang baik.

Pasal 4 Ayat (2) Perber No. 1 Tahun 2014 menentukan juga bahwa lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah harus memberikan perawatan dan rehabilitasi yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit harus menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang perawatan, ruang terapi, serta tenaga medis dan ahli rehabilitasi yang berpengalaman. Selain itu, lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit harus memastikan bahwa hak-hak pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dihormati dan dilindungi. Mere ka, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak atas pengakuan sebagai pribadi yang merdeka, hak atas perlindungan hukum, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak atas perawatan yang manusiawi.

Lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit juga harus memastikan bahwa proses rehabilitasi dilakukan secara sukarela dan dengan persetujuan dari pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, serta tidak boleh dilakukan dengan kekerasan atau ancaman. Pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika harus diberikan informasi yang cukup mengenai proses rehabilitasi yang akan dilakukan, serta diberikan kesempatan untuk memilih jenis dan metode rehabilitasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pasal 4 Ayat (2) Perber No. 1 Tahun 2014 juga menetapkan bahwa waktu maksimal untuk menempatkan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah adalah selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika yang sudah selesai menjalani proses rehabilitasi harus dikeluarkan dari lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit, kecuali jika diperlukan perpanjangan waktu rehabilitasi.

Perpanjangan waktu rehabilitasi dapat dilakukan apabila tim asesmen terpadu memutuskan bahwa seseorang masih membutuhkan proses rehabilitasi lebih lanjut. Perpanjangan waktu rehabilitasi ini tidak dapat melebihi waktu 6 bulan, sehingga total waktu maksimal untuk menempatkan seseorang di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah adalah 12 bulan. Namun, Pasal 4 Ayat (2) Perber No. 1 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika yang sudah selesai menjalani proses rehabilitasi harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kembali potensi mereka dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui program bimbingan dan pemulihan sosial, serta pelatihan keterampilan untuk membantu mereka mencari pekerjaan dan memulai kehidupan yang baru.

Pasal 4 Ayat (2) Perber No. 1 Tahun 2014 juga menetapkan bahwa lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses rehabilitasi yang dilakukan. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dilakukan dengan baik dan efektif, serta memberikan kesempatan kepada pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika untuk pulih dan mengembangkan kembali potensi mereka.

1. **Penilaian Hasil Implementasi *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Kasus Tindak Pidana Narkoba**

Implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan dilakukan dengan tujuan untuk membantu korban memulihkan diri dan mengurangi tindakan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Berikut adalah tabel yang memuat data-data yang relevan dengan keberhasilan implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Indikator Keberhasilan** | **Data** |
| 1. | Tingkat Partisipasi Korban | 75% dari total korban penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Pelabuhan Belawan mengikuti Program *Restorative Justice* dan Rehabilitasi. |
| 2. | Tingkat Keberhasilan Pemulihan Kesehatan Korban | 60% dari korban yang mengikuti program *restorative justice* dan rehabilitasi berhasil pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali berperan aktif dalam masyarakat. |
| 3. | Tingkat pengurangan tindak penyalahgunaan narkoba | Dalam kurun waktu tahun 202-2023 sejak diberlakukannya Perpol Nomor 8 Tahun 2021, implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi belum dapat terukur secara akademis tingkat pengurangan tindak penyalahgunaan narkoba dikarenakan rentang waktu masih terhitung singkat. |

Sumber: Polres Pelabuhan Belawan

1. Tingkat partisipasi korban dalam implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi

Tingkat partisipasi korban dalam implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi dapat diukur dengan menghitung jumlah korban yang mengikuti program tersebut. Semakin tinggi jumlah korban yang mengikuti program, maka tingkat partisipasi korban dalam implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi semakin tinggi pula. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi korban adalah tingkat kesadaran korban akan bahaya penyalahgunaan narkoba, keinginan korban untuk pulih dari ketergantungan narkoba, serta dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Program *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan berhasil menarik partisipasi sebanyak 75% dari total korban penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Partisipasi yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil membangkitkan kesadaran korban akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan mengubah pandangan mereka terhadap pemulihan.

1. Tingkat keberhasilan pemulihan kesehatan korban

Tingkat keberhasilan pemulihan kesehatan korban dapat diukur dengan mengamati perubahan perilaku korban setelah mengikuti program *restorative justice* dan rehabilitasi. Perilaku yang dimaksud meliputi tingkat ketergantungan narkoba, kepatuhan terhadap aturan hukum, serta kesehatan fisik dan mental korban. Semakin positif perubahan perilaku korban setelah mengikuti program, maka tingkat keberhasilan pemulihan kesehatan korban semakin tinggi pula. Dari 75% korban yang mengikuti program *restorative justice* dan rehabilitasi, sebanyak 60% berhasil pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali berperan aktif dalam masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memberikan dukungan yang cukup untuk korban agar dapat melepaskan diri dari ketergantungan narkoba dan memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka.

1. Tingkat pengurangan tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Pelabuhan Belawan

Berdasarkan hasil data dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023 sejak diberlakukannya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat pengurangan tindak penyalahgunaan narkoba setelah implementasi restorative justice dan rehabilitasi belum dapat terukur secara akademis karena rentang waktu masih terhitung singkat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih luas dan mendalam untuk mengevaluasi dampak program tersebut secara keseluruhan pada tingkat pengurangan tindak penyalahgunaan narkoba dalam jangka panjang.

1. **Evaluasi Keberhasilan Implementasi *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Kasus Tindak Pidana Narkoba**

Dalam proses identifikasi korban penyalahgunaan narkoba, Polres Pelabuhan Belawan telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti keluarga korban, LSM, dan masyarakat. Pembentukan tim pelaksana program *restorative justice* juga dilakukan dengan memilih anggota yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dalam mediasi dan rehabilitasi.

Pelaksanaan sesi mediasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice*, seperti keadilan, keamanan, kebebasan, dan keseimbangan. Dalam proses mediasi, korban dilibatkan untuk menyampaikan pengalaman dan perasaannya terkait tindakan penyalahgunaan narkobanya, sementara pihak yang terdampak diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dirasakan akibat dari tindakan korban. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat memperbaiki hubungan antara korban dan pihak yang terdampak.[[83]](#footnote-83)

Program rehabilitasi yang dilaksanakan juga telah menunjukkan hasil yang baik. Korban yang membutuhkan rehabilitasi diberikan pengarahan dan dukungan untuk mengubah perilaku penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan program rehabilitasi dilakukan dengan melibatkan ahli di bidang kesehatan dan sosial, sehingga korban mendapatkan perawatan dan dukungan yang optimal.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program *restorative justice* dan rehabilitasi dilakukan secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kualitas, keberhasilan, dan keberlanjutan dari program tersebut.

Secara keseluruhan, langkah-langkah implementasi *restorative justice* pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan telah dilakukan dengan baik. Namun, masih diperlukan evaluasi dan perbaikan yang terus menerus untuk meningkatkan efektivitas dari program tersebut.

Implementasi rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan telah melalui beberapa langkah penting yang dijalankan dengan baik. Langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental terhadap korban, yang bertujuan untuk menentukan jenis terapi yang tepat untuk setiap korban. Selanjutnya, tim rehabilitasi akan menentukan jenis terapi yang akan diberikan untuk korban, seperti terapi perilaku kognitif dan terapi kelompok.[[84]](#footnote-84)

Proses rehabilitasi dilakukan secara teratur dengan dukungan dari tim rehabilitasi dan keluarga korban. Selama proses rehabilitasi, korban juga diberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan pentingnya menjalani hidup yang sehat. Proses rehabilitasi juga dilakukan dengan mengajak korban untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pembelajaran keterampilan baru yang dapat membantu mereka membangun kembali hidup yang sehat dan produktif.

Selain itu, pengawasan dan pemantauan secara rutin dilakukan untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban dapat menjalani proses rehabilitasi secara benar dan terus menerus untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tim rehabilitasi juga memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu korban dalam mengatasi setiap tantangan yang mungkin muncul selama proses rehabilitasi. Secara keseluruhan, implementasi rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan dapat dikatakan berhasil dengan baik.

Keberhasilan implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan dapat dilihat dari beberapa indikator evaluasi yang telah dilakukan. Pertama, tingkat partisipasi korban dalam program *restorative justice* dan rehabilitasi cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa korban telah merasa terlibat dan berperan aktif dalam proses pemulihan diri mereka. Selain itu, tingkat keberhasilan pemulihan kesehatan korban yang mencapai 60% menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang diberikan telah memberikan dampak positif pada kesehatan fisik dan mental korban.

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi pada masa depan, perlu dilakukan beberapa rekomendasi. Pertama, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya program *restorative justice* dan rehabilitasi bagi korban. Dengan demikian, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya upaya pencegahan dan pemulihan dari penyalahgunaan narkoba.[[85]](#footnote-85)

Kedua, perlu memperluas jangkauan program *restorative justice* dan rehabilitasi sehingga dapat menjangkau lebih banyak korban penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga rehabilitasi dan puskesmas, sehingga program dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Ketiga, perlu menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program *restorative justice* dan rehabilitasi. Pihak-pihak terkait yang dimaksud dapat berupa ahli terapi, psikolog, atau dokter spesialis yang dapat membantu dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.

Terakhir, perlu memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap korban yang telah menjalani program rehabilitasi agar dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kambuh atau ketergantungan ulang pada narkoba. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada korban, serta melibatkan keluarga korban dalam proses pemantauan. Dengan demikian, dapat diharapkan program *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan lebih efektif dan berhasil dalam membantu korban untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka.

Berikut adalah tabel evaluasi implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Evaluasi Implementasi** | **Hasil Evaluasi** |
| 1. | Evaluasi terhadap langkah-langkah implementasi *restorative justice* | Sudah dilaksanakan dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya |
| 2. | Evaluasi terhadap langkah-langkah implementasi rehabilitasi | Sudah dilaksanakan dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya |
| 3. | Evaluasi terhadap keberhasilan implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi | Berhasil memberikan dampak positif |
| 4. | Rekomendasi untuk perbaikan implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi pada masa depan | Meningkatkan sosialisasi dan edukasi, memperluas jangkauan program, menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dan memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap korban |
| 5. | Tingkat partisipasi korban dalam implementasi *restorative justice* | Tinggi |
| 6. | Tingkat keberhasilan pemulihan kesehatan korban | 60% berhasil pulih |
| 7. | Tingkat pengurangan tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Pelabuhan Belawan | Belum terukur |

Sumber: Polres Pelabuhan Belawan

Tabel di atas merupakan evaluasi implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan yang dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu langkah-langkah implementasi *restorative justice*, langkah-langkah implementasi rehabilitasi, keberhasilan implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi, rekomendasi perbaikan, tingkat partisipasi korban, tingkat keberhasilan pemulihan kesehatan korban, dan tingkat pengurangan tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Pelabuhan Belawan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya. Tingkat partisipasi korban dalam program ini sangat tinggi, dan 60% dari korban berhasil pulih. Selain itu, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Pelabuhan Belawan juga belum terukur secara pasti setelah program ini dilaksanakan. Rekomendasi perbaikan yang diajukan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi, memperluas jangkauan program, menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dan memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap korban. Dengan demikian, diharapkan program *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba dapat semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

**BAB IV**

**KENDALA PENYIDIK DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DAN REHABILITASI PADA PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI POLRES PELABUHAN BELAWAN**

1. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kendala Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi**

Kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Polisi sebagai penegak hukum harus bisa menangani kasus tersebut dengan baik. Salah satu cara yang bisa digunakan oleh polisi adalah *restorative justice* dan rehabilitasi. Namun, dalam penerapannya, penyidik sering mengalami kendala. Terdapat 2 (dua) kendala yang dihadapi oleh penyidik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi, terdapat berbagai faktor internal yang mempengaruhi kendala penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Ketidakefektifan *Restorative Justice* pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika

*Restorative justice* merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik di luar sistem hukum pidana. Tujuan dari *restorative justice* adalah memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bentuk rekonsiliasi. Namun, pendekatan ini masih kontroversial dalam hal penerapannya dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika dianggap sangat kompleks karena melibatkan masalah kesehatan dan sosial yang mendalam serta sulit diatasi. Penyalahgunaan narkotika dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik individu, keluarga, dan masyarakat secara umum. Selain itu, peredaran dan perdagangan narkotika juga melibatkan jaringan kriminal yang semakin kompleks, sehingga memerlukan penanganan yang tegas dan terkoordinasi dengan baik oleh berbagai pihak, seperti lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.[[86]](#footnote-86)

*Restorative justice* sendiri memiliki prinsip dasar yaitu mengganti pendekatan pembalasan (*retributive justice*) dengan pendekatan rekonsiliasi (*restorative justice*) untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat kejahatan. Dalam *restorative justice*, korban, pelaku, dan masyarakat diminta untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Pendekatan ini berusaha untuk memulihkan hubungan antara mereka dan mempromosikan perbaikan yang positif bagi semua orang. Namun, dalam kasus penyalahgunaan narkotika, *restorative justice* belum terbukti efektif. Salah satu alasan utamanya adalah karena penyalahgunaan narkotika adalah tindakan kriminal yang dapat membahayakan orang lain serta masyarakat. Hal ini berbeda dengan kasus-kasus lain yang mungkin lebih cocok untuk diatasi dengan *restorative justice*, seperti kasus pencurian atau kekerasan dalam rumah tangga.[[87]](#footnote-87)

Pada pelaku penyalahgunaan narkotika seringkali membutuhkan intervensi medis dan rehabilitasi untuk dapat pulih dari kecanduan narkotika. *Restorative justice* mungkin tidak dapat memberikan intervensi tersebut dengan memadai. Pnyalahgunaan narkotika lebih membutuhkan pendekatan holistik, yang mencakup rehabilitasi, dukungan medis, dan dukungan sosial yang terintegrasi.

*Restorative justice* juga dapat menjadi tidak efektif karena stigma sosial terhadap penyalahguna narkotika. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung melihat penyalahguna narkotika sebagai orang yang lemah atau kurang memiliki kekuatan untuk mengendalikan perilaku mereka. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan menghambat proses rekonsiliasi yang dilakukan melalui *restorative justice*.[[88]](#footnote-88)

Lebih jauh lagi, kasus penyalahgunaan narkotika juga seringkali melibatkan jaringan kriminal yang kompleks, termasuk peredaran dan perdagangan narkotika. Penanganan kasus-kasus semacam ini memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan otoritas pemerintah lainnya. Hal ini dapat menyulitkan proses *restorative justice* yang membutuhkan keterlibatan yang terbatas dari lembaga-lembaga ini. Namun, meskipun *restorative justice* mungkin tidak efektif secara langsung dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, ada beberapa elemen dari *restorative justice* yang dapat digunakan dalam pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk menangani kasus-kasus ini. Misalnya, *restorative justice* dapat membantu dalam memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika, seperti anggota keluarga atau teman dekat. Selain itu, *restorative justice* juga dapat membantu dalam mempromosikan kesadaran masyarakat dan pendidikan tentang masalah penyalahgunaan narkotika dan dampaknya bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.[[89]](#footnote-89)

1. Minimnya Anggaran

Penerapan *restoratif justice* dan rehabilitasi menjadi semakin penting dalam penanganan kasus-kasus kriminal di Indonesia. Namun, masalah anggaran yang minim membuat proses ini tidak dapat dilakukan secara optimal oleh Polres di seluruh Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Keuangan Polri, Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan realisasi anggaran sebesar Rp 15,35 M untuk mendukung kebutuhan operasi kepolisian. Dana operasi merupakan Belanja dalam rangka menyelenggarakan kegiatan kepolisian untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk uang lembur dan honorarium serta belanja barang untuk uang makan dan uang saku operasi, uang patroli serta penyuluhan. Sedangkan operasi kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi Kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas).[[90]](#footnote-90) Sementara anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kasus-kasus kriminal sebesar Rp 1,1 M, termasuk kasus narkotika. Anggaran tersebut hanya cukup untuk menangani 50 laporan kepolisian atau kasus dalam satu tahun. Oleh karena itu, Polres Pelabuhan Belawan harus mengelola anggaran yang mereka terima dengan sangat hati-hati, terutama dalam hal penerapan *restoratif justice* dan rehabilitasi.[[91]](#footnote-91)

Dalam konteks anggaran yang minim yang diterima oleh Polres, penerapan *restoratif justice* dan rehabilitasi menjadi semakin sulit. Banyak Polres yang harus mengutamakan kegiatan-kegiatan lain seperti patroli dan penegakan hukum, yang terkadang lebih diprioritaskan oleh masyarakat. Namun, tanpa penerapan *restoratif justice* dan rehabilitasi, upaya penegakan hukum dapat menjadi tidak efektif dan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

1. Spesifikasi Lembaga Rehabilitasi yang Ditunjuk Pemerintah

Tidak adanya lembaga rehabilitasi spesifik yang ditunjuk oleh pemerintah terhadap penerapan *restoratif justice* dan rehabilitasi, maka polres akan menghadapi beberapa akibat, yaitu: kurangnya akses ke program rehabilitasi yang efektif, tidak adanya standar yang jelas, tidak adanya konsistensi dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi, dan potensi untuk pengulangan kejahatan.[[92]](#footnote-92)

Salah satu tantangan dalam sistem keamanan publik adalah kurangnya akses ke program rehabilitasi yang efektif. Polres mungkin tidak memiliki akses ke program rehabilitasi yang terbukti berhasil dalam membantu pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka. Masalah ini diperparah oleh tidak adanya lembaga rehabilitasi spesifik yang ditunjuk oleh pemerintah. Tanpa lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, polres akan kesulitan menetapkan standar yang jelas untuk rehabilitasi dan penerapan *restorative justice*, seperti program yang harus diikuti dan metode evaluasi untuk mengukur keberhasilan rehabilitasi.[[93]](#footnote-93)

Tidak adanya konsistensi dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi juga menjadi masalah yang serius. Tanpa lembaga rehabilitasi spesifik yang ditunjuk oleh pemerintah, polres mungkin tidak dapat menjamin konsistensi dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi di seluruh wilayah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Tantangan lainnya adalah potensi untuk pengulangan kejahatan. Jika polres tidak dapat menyediakan akses ke program rehabilitasi yang efektif, ada risiko bahwa pelaku kejahatan akan kembali melakukan kejahatan setelah mereka dibebaskan dari tahanan. Ini dapat membahayakan masyarakat dan memperburuk masalah keamanan publik.[[94]](#footnote-94)

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ada lembaga rehabilitasi spesifik yang ditunjuk untuk penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi. Hal ini akan membantu memastikan konsistensi dalam penerapan hukum di seluruh wilayah, serta memberikan akses ke program rehabilitasi yang efektif bagi pelaku kejahatan. Pemerintah perlu berinvestasi dalam lembaga rehabilitasi untuk memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para pelaku kejahatan yang ingin memperbaiki perilaku mereka. Dengan memberikan akses ke program rehabilitasi yang efektif, pelaku kejahatan akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, mencegah pengulangan kejahatan dan membangun masyarakat yang lebih aman dan damai.[[95]](#footnote-95)

1. Faktor Eksternal

Dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi, terdapat berbagai faktor eksternal yang juga turut mempengaruhi kendala penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Kurangnya Pengawasan Lembaga Rehabilitasi

Penggunaan narkoba merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan oleh masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dapat membawa dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan dampak hukum yang serius. Oleh karena itu, lembaga rehabilitasi menjadi salah satu solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Lembaga rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk mengatasi masalahnya dan kembali ke kehidupan yang normal. Namun, kurangnya pengawasan lembaga rehabilitasi menjadi kendala bagi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus penyalahgunaan narkotika.[[96]](#footnote-96)

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan holistik dalam menanggulanginya. Pendekatan restorative justice menjadi salah satu pendekatan yang diterapkan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. *Restorative justice* memandang penyalahgunaan narkoba sebagai masalah sosial yang membutuhkan pemulihan yang holistik, yang melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.[[97]](#footnote-97)

Penerapan *restorative justice* pada kasus penyalahgunaan narkoba tidaklah mudah. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan pendekatan ini adalah kurangnya pengawasan lembaga rehabilitasi. Kurangnya pengawasan lembaga rehabilitasi dapat memungkinkan korban penyalahgunaan narkoba untuk melarikan diri dan tidak melanjutkan proses rehabilitasi. Hal ini menjadi kendala bagi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus penyalahgunaan narkoba. *Restorative justice* membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Namun, jika korban melarikan diri dari lembaga rehabilitasi, maka keterlibatan korban dalam proses *restorative justice* menjadi sulit dilakukan.[[98]](#footnote-98)

Kurangnya pengawasan lembaga rehabilitasi juga dapat memungkinkan pelaku untuk kembali ke kebiasaan lama mereka setelah mereka keluar dari lembaga rehabilitasi. Pelaku dapat kembali ke lingkungan yang memperburuk kecanduan mereka dan melanjutkan perilaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga menjadi kendala bagi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus penyalahgunaan narkoba.

1. Minimnya Koordinasi antara Penyidik dan Lembaga Rehabilitasi

Koordinasi antara penyidik dan lembaga rehabilitasi sangat penting dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkotika. Ada beberapa bentuk koordinasi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertukaran informasi antara penyidik dan lembaga rehabilitasi diperlukan untuk membantu lembaga rehabilitasi merencanakan program rehabilitasi yang tepat untuk korban. Selain itu, penyidik dan lembaga rehabilitasi perlu melakukan pengawasan bersama setelah korban menjalani program rehabilitasi untuk memastikan bahwa korban tetap menjalankan program rehabilitasi dan tidak kembali ke penyalahgunaan narkotika.[[99]](#footnote-99)

Koordinasi antara penyidik dan lembaga rehabilitasi juga penting dalam pemulangan korban setelah program rehabilitasi selesai. Dalam hal ini, penyidik dan lembaga rehabilitasi perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa korban dapat kembali ke masyarakat dengan aman. Kolaborasi dalam penyelenggaraan *restorative justice* juga dapat dilakukan untuk membantu korban memperoleh pemulihan yang lebih baik dan membantu masyarakat memahami dampak dari penyalahgunaan narkotika. Dalam melakukan koordinasi tersebut, perlu diperhatikan bahwa kerjasama yang efektif antara penyidik dan lembaga rehabilitasi sangat penting untuk mencapai tujuan penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkotika.[[100]](#footnote-100)

Minimnya koordinasi antara penyidik dengan lembaga rehabilitasi dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan dampak yang signifikan. Pertama-tama, program rehabilitasi yang tidak tepat dapat terjadi karena lembaga rehabilitasi tidak memahami kondisi dan sejarah penyalahgunaan narkotika korban secara menyeluruh. Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko kambuh kembali ke penyalahgunaan narkotika karena tidak adanya pengawasan yang memadai setelah korban menjalani program rehabilitasi. Selain itu, tanpa koordinasi yang memadai dalam pemulangan korban, korban mungkin kesulitan untuk kembali ke masyarakat dengan aman dan terintegrasi kembali ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Akhirnya, minimnya koordinasi dalam penyelenggaraan *restorative justice* dapat mengurangi efektivitas proses pemulihan korban.

1. Lembaga Rehabilitasi Menjadi Ajang Bisnis

Lembaga rehabilitasi disebut sebagai ajang bisnis dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkotika karena terdapat kecenderungan beberapa lembaga rehabilitasi yang lebih memprioritaskan keuntungan daripada pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, lembaga rehabilitasi dapat melihat korban sebagai "pasar" potensial yang dapat menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan.[[101]](#footnote-101)

Salah satu penyebab lembaga rehabilitasi menjadi ajang bisnis adalah karena banyaknya pihak yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Kondisi ini menjadi peluang bagi beberapa lembaga rehabilitasi untuk menjadikannya sebagai sumber keuntungan. Seiring dengan itu, biaya yang tinggi untuk melakukan program rehabilitasi juga membuat beberapa lembaga rehabilitasi menetapkan harga yang mahal bagi korban yang ingin mengikuti program rehabilitasi.[[102]](#footnote-102)

Tidak hanya itu, beberapa lembaga rehabilitasi juga diduga melakukan praktik-praktik yang merugikan korban, seperti menahan korban dalam waktu yang lebih lama daripada yang seharusnya, memberikan layanan yang tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh korban, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis dalam proses rehabilitasi.

Situasi ini dapat diperparah ketika pasien yang seharusnya menjalani program rehabilitasi selama 6 (enam) bulan dipersingkat menjadi hanya 2 (dua) bulan saja. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa lembaga rehabilitasi tersebut melakukan jual beli surat keterangan telah menjalani rehab tanpa memperhatikan proses rehabilitasi yang sebenarnya. Pasien yang hanya mengikuti program rehabilitasi selama 2 (dua) bulan saja, tidak akan mendapatkan manfaat yang cukup untuk pulih dari penyalahgunaan narkotika dan bisa kembali mengulangi perilaku negatif tersebut.

Dengan kata lain, minimnya kualitas proses rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang menjadi ajang bisnis dapat berdampak buruk pada kondisi pasien dan mengurangi efektivitas *restorative justice* dalam membantu korban penyalahgunaan narkotika pulih dan kembali berkontribusi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih lembaga rehabilitasi yang memprioritaskan kualitas proses rehabilitasi, dengan melibatkan tenaga profesional yang berpengalaman dan mempertimbangkan kebutuhan individual pasien.[[103]](#footnote-103)

1. **Strategi Penanganan Kendala dalam Penerapan Restorative Justice dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba**
2. Pendekatan Holistik dan Terintegrasi

Pendekatan *restorative justice* dan rehabilitasi dianggap penting dalam menangani penyalahgunaan narkotika, namun keduanya menghadapi kendala yang kompleks. *Restorative justice* dapat efektif dalam menangani konflik antara korban dan pelaku, tetapi belum terbukti efektif dalam penyalahgunaan narkotika karena kompleksitas masalah yang melibatkan jaringan kriminal. Sementara rehabilitasi dapat membantu individu untuk pulih dari penyalahgunaan narkotika, namun menghadapi kendala seperti stigma sosial, akses ke perawatan yang tepat dan terjangkau, kurangnya dukungan sosial, dan program rehabilitasi yang kurang sesuai untuk individu dengan kebutuhan khusus.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Beberapa strategi yang dapat digunakan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah penyalahgunaan narkotika dan dampaknya, mengintegrasikan layanan kesehatan dan sosial, melakukan pemulihan korban dan pelaku secara bersamaan, menggunakan pendekatan rehabilitasi yang berfokus pada kebutuhan individu, memberikan dukungan sosial yang kuat, meningkatkan akses dan ketersediaan layanan, mengembangkan penggunaan teknologi, dan membangun kerjasama yang kuat antara berbagai pihak. Program-program pendidikan dan kampanye publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, sementara integrasi layanan kesehatan dan sosial dapat membantu individu mengakses perawatan dan dukungan yang tepat. Pemulihan korban dan pelaku secara bersama-sama dapat membantu memperbaiki hubungan yang rusak dan mengurangi risiko tindakan balas dendam. Pendekatan rehabilitasi yang berfokus pada kebutuhan individu dan dukungan sosial yang kuat juga dapat membantu individu yang menjalani rehabilitasi dan *restorative justice* untuk pulih sepenuhnya dari kecanduan narkotika. Peningkatan akses dan ketersediaan layanan, penggunaan teknologi, dan pengembangan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak juga dapat membantu memperbaiki efektivitas dan efisiensi layanan rehabilitasi dan *restorative justice*.[[104]](#footnote-104)

1. Peningkatan Anggaran

Penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi semakin penting dalam penanganan kasus-kasus kriminal di Indonesia. Namun, masalah anggaran yang minim membuat proses ini tidak dapat dilakukan secara optimal oleh Polres di seluruh Indonesia. Polres Pelabuhan Belawan hanya mendapatkan anggaran Rp 1,1 M untuk menangani kasus-kasus kriminal, sedangkan anggaran untuk operasi kepolisian sebesar Rp 15,35 M. Polres Pelabuhan Belawan harus mengelola anggaran yang mereka terima dengan sangat hati-hati, terutama dalam hal penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi. Banyak Polres yang harus mengutamakan kegiatan-kegiatan lain seperti patroli dan penegakan hukum, yang terkadang lebih diprioritaskan oleh masyarakat. Tanpa penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi, upaya penegakan hukum dapat menjadi tidak efektif dan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Beberapa solusi yang bisa diterapkan adalah peningkatan anggaran untuk penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi, pelatihan untuk petugas kepolisian dan pejabat pemerintah terkait, serta memperluas jangkauan program *restorative justice* dan rehabilitasi ke daerah-daerah terpencil. Pertama-tama, pemerintah harus meningkatkan anggaran yang diperuntukkan untuk penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi di seluruh Indonesia. Hal ini sangat penting karena memungkinkan Polres untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal penanganan kasus-kasus kriminal dan pemulihan korban. Anggaran yang cukup akan membantu Polres untuk melaksanakan program *restorative justice* dan rehabilitasi dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, hal ini juga akan memperlihatkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.[[105]](#footnote-105)

Selanjutnya, pelatihan harus diberikan kepada petugas kepolisian dan pejabat pemerintah terkait mengenai penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi. Hal ini penting karena petugas kepolisian dan pejabat pemerintah harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip-prinsip *restorative justice* dan rehabilitasi untuk dapat mengimplementasikannya dengan baik. Pelatihan harus mencakup pemahaman tentang proses *restorative justice*, teknik-teknik mediasi, dan cara melakukan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.

Terakhir, program *restorative justice* dan rehabilitasi harus diperluas ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Hal ini penting karena banyak daerah di Indonesia yang masih sulit dijangkau dan belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan hukum. Memperluas jangkauan program *restorative justice* dan rehabilitasi ke daerah-daerah terpencil akan membantu mengatasi masalah ini dan memungkinkan masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan akses ke layanan hukum yang lebih baik.

1. Penunjukkan Lembaga Rehabilitasi oleh Pemerintah

Kurangnya lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi dapat mengakibatkan beberapa masalah bagi polres. Masalah tersebut antara lain adalah kurangnya akses ke program rehabilitasi yang efektif, tidak adanya standar yang jelas, tidak adanya konsistensi dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi, dan potensi untuk pengulangan kejahatan. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu memastikan adanya lembaga rehabilitasi yang ditunjuk secara khusus untuk penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi.[[106]](#footnote-106)

Dengan adanya lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, polres dapat memberikan akses ke program rehabilitasi yang efektif bagi para pelaku kejahatan. Hal ini akan membantu memperbaiki perilaku mereka dan mencegah pengulangan kejahatan. Selain itu, dengan adanya standar yang jelas, polres dapat menetapkan program yang harus diikuti dan metode evaluasi untuk mengukur keberhasilan rehabilitasi. Dengan demikian, konsistensi dalam penerapan hukum dapat terjamin di seluruh wilayah.

Pemerintah juga perlu berinvestasi dalam lembaga rehabilitasi untuk memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para pelaku kejahatan yang ingin memperbaiki perilaku mereka. Dengan memberikan akses ke program rehabilitasi yang efektif, pelaku kejahatan akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, mencegah pengulangan kejahatan, dan membangun masyarakat yang lebih aman dan damai. Dalam keseluruhan, dengan adanya lembaga rehabilitasi yang ditunjuk secara khusus oleh pemerintah, dapat membantu mengatasi tantangan dalam sistem keamanan publik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

1. Peningkatan Pengawasan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi dalam menanggulanginya. *Restorative justice* menjadi salah satu pendekatan yang diterapkan untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengawasan lembaga rehabilitasi, yang memungkinkan korban melarikan diri dan pelaku kembali ke perilaku penyalahgunaan narkoba setelah keluar dari lembaga rehabilitasi.[[107]](#footnote-107)

Dalam mengatasi kendala kurangnya pengawasan lembaga rehabilitasi dalam menerapkan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus penyalahgunaan narkoba, perlu adanya tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga rehabilitasi, penyidik, masyarakat, dan pemerintah. Pertama, lembaga rehabilitasi harus meningkatkan pengawasan dan memperkuat program rehabilitasi mereka untuk memastikan bahwa korban penyalahgunaan narkoba melakukan proses rehabilitasi secara optimal dan meminimalkan kemungkinan mereka untuk kembali ke perilaku penyalahgunaan narkoba. Kedua, penyidik harus meningkatkan koordinasi mereka dengan lembaga rehabilitasi untuk memastikan bahwa korban penyalahgunaan narkoba menerima perawatan yang optimal dan pelaku tidak kembali ke perilaku penyalahgunaan narkoba. Ketiga, masyarakat harus mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan mendukung individu yang terlibat dalam proses rehabilitasi. Keempat, pemerintah harus meningkatkan dukungan mereka untuk lembaga rehabilitasi dan program pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat regulasi dan pengawasan lembaga rehabilitasi. Dengan tindakan bersama ini, diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba secara holistik dan efektif.[[108]](#footnote-108)

1. Meningkatkan Koordinasi Penyidik dan Lembaga Rehabilitasi

Koordinasi antara penyidik dan lembaga rehabilitasi dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkotika adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa korban penyalahgunaan narkotika mendapat perawatan yang optimal dan meminimalkan kemungkinan mereka kembali ke perilaku penyalahgunaan narkotika. Untuk memastikan koordinasi yang efektif antara penyidik dan lembaga rehabilitasi, perlu ada solusi yang tepat dan komprehensif.[[109]](#footnote-109)

Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antara penyidik dan lembaga rehabilitasi dalam hal pertukaran informasi. Pertukaran informasi yang baik dapat membantu lembaga rehabilitasi merencanakan program rehabilitasi yang tepat untuk korban. Dengan memahami kondisi dan sejarah penyalahgunaan narkotika korban, lembaga rehabilitasi dapat merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan korban. Oleh karena itu, penyidik dan lembaga rehabilitasi perlu bekerja sama dalam memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia dan dibagikan dengan tepat.

Selain itu, penting untuk meningkatkan koordinasi antara penyidik dan lembaga rehabilitasi dalam hal pengawasan. Setelah korban menjalani program rehabilitasi, penting untuk melakukan pengawasan bersama untuk memastikan bahwa korban tetap menjalankan program rehabilitasi dan tidak kembali ke penyalahgunaan narkotika. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan reguler antara penyidik dan lembaga rehabilitasi untuk membahas kemajuan korban. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan dengan memastikan bahwa korban diberikan dukungan yang cukup setelah keluar dari lembaga rehabilitasi. Dukungan ini dapat mencakup program pascarehabilitasi dan pengawasan dari masyarakat.[[110]](#footnote-110)

Koordinasi antara penyidik dan lembaga rehabilitasi juga penting dalam hal pemulangan korban setelah program rehabilitasi selesai. Dalam hal ini, penyidik dan lembaga rehabilitasi perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa korban dapat kembali ke masyarakat dengan aman. Kerjasama ini dapat mencakup persiapan sebelum pemulangan, seperti memberikan informasi tentang program pascarehabilitasi dan memastikan bahwa korban memiliki tempat tinggal yang aman. Selain itu, penyidik dan lembaga rehabilitasi dapat memberikan pelatihan untuk membantu korban mengatasi tekanan dari masyarakat yang mungkin menyebabkan mereka kembali ke penyalahgunaan narkotika.

Kolaborasi dalam penyelenggaraan *restorative justice* juga dapat dilakukan untuk membantu korban memperoleh pemulihan yang lebih baik dan membantu masyarakat memahami dampak dari penyalahgunaan narkotika. *Restorative justice* dapat membantu korban dan pelaku penyalahgunaan narkotika untuk berkomunikasi secara terbuka dan memahami dampak yang ditimbulkan oleh perilaku mereka.

1. Pengawasan Terhadap Lembaga Rehabilitasi

Beberapa lembaga rehabilitasi terkadang lebih memprioritaskan keuntungan daripada pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pihak yang membutuhkan layanan rehabilitasi dan biaya yang tinggi untuk melakukan program rehabilitasi. Beberapa lembaga rehabilitasi juga diduga melakukan praktik-praktik yang merugikan korban. Situasi ini dapat berdampak buruk pada kondisi pasien dan mengurangi efektivitas *restorative justice* dalam membantu korban penyalahgunaan narkotika pulih dan kembali berkontribusi dalam masyarakat.[[111]](#footnote-111)

Untuk mengatasi masalah lembaga rehabilitasi yang menjadi ajang bisnis dan merugikan korban penyalahgunaan narkotika, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang tepat. Pertama, diperlukan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang terhadap lembaga rehabilitasi. Hal ini akan meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik-praktik yang merugikan korban dan memastikan kualitas proses rehabilitasi yang dilakukan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan sanksi tegas kepada lembaga rehabilitasi yang melanggar aturan dan melakukan praktik-praktik yang tidak etis.[[112]](#footnote-112)

Kedua, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih lembaga rehabilitasi yang berkualitas dan memprioritaskan pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak korban serta memberikan pilihan yang lebih baik bagi mereka dalam memilih lembaga rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

Ketiga, lembaga rehabilitasi perlu mengutamakan kualitas proses rehabilitasi dengan melibatkan tenaga profesional yang berpengalaman dan mempertimbangkan kebutuhan individual pasien. Selain itu, harga yang ditetapkan haruslah sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan dan dapat dijangkau oleh korban penyalahgunaan narkotika.

Dengan tindakan-tindakan yang tepat dan sinergi dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi, diharapkan bahwa masalah lembaga rehabilitasi yang menjadi ajang bisnis dapat diminimalisir dan korban penyalahgunaan narkotika dapat mendapatkan proses rehabilitasi yang berkualitas dan efektif. Ini akan mendukung efektivitas *restorative justice* dalam membantu korban penyalahgunaan narkotika pulih dan kembali berkontribusi dalam masyarakat.[[113]](#footnote-113)

1. **Peran Masyarakat dalam Mendukung Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Polres Pelabuhan Belawan**

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks dan merusak bagi masyarakat. Selain menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan individu yang terlibat, penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, masalah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu prioritas nasional yang harus diatasi. Sebagai respon terhadap masalah ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani penyalahgunaan narkoba, termasuk di antaranya adalah penerapan hukuman pidana bagi para pelaku kejahatan narkotika. Namun, dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, ada pendekatan lain yang bisa diterapkan selain hukuman pidana. Pendekatan tersebut adalah *restorative justice* dan rehabilitasi. *Restorative justice* adalah pendekatan yang berfokus pada memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindakan kejahatan dengan mengembalikan keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Sedangkan rehabilitasi adalah upaya untuk membantu individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk kembali ke kehidupan yang produktif dan sehat.

Dalam konteks penanganan penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi

Penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam proses ini karena masyarakat adalah pihak yang langsung terlibat dan terdampak oleh masalah penyalahgunaan narkoba.

Salah satu kontribusi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi adalah dengan membantu mengidentifikasi korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Dalam banyak kasus, korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba adalah orang-orang yang hidup di lingkungan yang sama dengan masyarakat sekitar. Karena itu, masyarakat dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka dan memberikan informasi yang relevan kepada polisi untuk membantu proses penanganan kasus tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan dukungan moral dan emosional kepada korban dan keluarga mereka. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan trauma dan kesulitan emosional yang signifikan bagi korban dan keluarga mereka. Dengan memberikan dukungan moral dan emosional kepada mereka, masyarakat dapat membantu korban dan keluarga mereka untuk pulih dari pengalaman traumatis tersebut.[[114]](#footnote-114)

Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam upaya rehabilitasi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi melibatkan berbagai program untuk membantu para pelaku untuk pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali ke kehidupan yang produktif dan sehat. Salah satu program rehabilitasi yang dapat diikuti oleh para pelaku penyalahgunaan narkoba adalah program komunitas. Program ini melibatkan masyarakat dalam membantu para pelaku penyalahgunaan narkoba untuk pulih dan kembali berkontribusi dalam masyarakat.[[115]](#footnote-115)

Selain program komunitas, ada juga program rehabilitasi lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat dapat membantu menyediakan lapangan kerja bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba yang telah pulih agar mereka dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat secara produktif. Dengan cara ini, masyarakat dapat membantu memperkuat upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkoba.

Selain kontribusi langsung, masyarakat juga dapat berkontribusi dengan cara menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kampanye anti-narkoba dan menyebarkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui media sosial, surat kabar, radio, dan televisi. Dengan cara ini, masyarakat dapat membantu mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan memperkuat upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, masyarakat juga dapat memperkuat upaya pemerintah dalam penerapan hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika. Dalam hal ini, masyarakat dapat membantu polisi dengan memberikan informasi yang relevan tentang kejahatan narkotika di lingkungan mereka. Dengan cara ini, masyarakat dapat membantu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika dan membantu mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.[[116]](#footnote-116)

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Polres Pelabuhan Belawan adalah sebuah institusi keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah Belawan. Polres Pelabuhan Belawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas, termasuk dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penanganan kasus penyalahgunaan narkoba menjadi penting bagi Polres Pelabuhan Belawan.

Dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, Polres Pelabuhan Belawan menggunakan pendekatan *restorative justice* dan rehabilitasi. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengalaman positif kepada korban penyalahgunaan narkoba, serta membantu mereka dalam memulihkan kehidupan mereka. Namun, dalam praktiknya, tidak semua masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba mau mengikuti program *restorative justice* dan rehabilitasi yang diberikan oleh Polres Pelabuhan Belawan.

Penolakan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus korban penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor tersebut perlu diketahui oleh Polres Pelabuhan Belawan untuk dapat memperbaiki program restorative justice dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan adalah sebagai berikut:[[117]](#footnote-117)

1. Stigma Sosial

Stigma sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan. Stigma sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba dapat memperburuk keadaan psikologis mereka, sehingga mereka merasa malu untuk mengikuti program *restorative justice* dan rehabilitasi yang ditawarkan oleh Polres Pelabuhan Belawan. Karena itu, Polres Pelabuhan Belawan perlu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya *restorative justice* dan rehabilitasi sebagai bentuk upaya membantu korban penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa korban penyalahgunaan narkoba juga membutuhkan dukungan dan bantuan dari lingkungan sekitarnya.

1. Kurangnya Pengetahuan tentang *Restorative Justice* dan Rehabilitasi

Kurangnya pengetahuan tentang *restorative justice* dan rehabilitasi juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang *restorative justice* dan rehabilitasi cenderung tidak memahami manfaat dari program tersebut. Karena itu, Polres Pelabuhan Belawan perlu melakukan sosialisasi tentang *restorative justice* dan rehabilitasi secara meny eluruh kepada masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, brosur, poster, dan lain sebagainya. Dengan adanya sosialisasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat memahami manfaat dari program *restorative justice* dan rehabilitasi yang ditawarkan oleh Polres Pelabuhan Belawan.[[118]](#footnote-118)

1. Kurangnya Akses ke Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi

Kurangnya akses ke pelayanan kesehatan dan rehabilitasi juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan dan rehabilitasi yang memadai cenderung sulit untuk mengikuti program *restorative justice* dan rehabilitasi yang ditawarkan oleh Polres Pelabuhan Belawan. Karena itu, Polres Pelabuhan Belawan perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti rumah sakit, puskesmas, dan lembaga rehabilitasi, untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengikuti program *restorative justice* dan rehabilitasi. Dengan adanya akses yang mudah, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program *restorative justice* dan rehabilitasi dapat meningkat.

1. Kurangnya Dukungan Keluarga dan Lingkungan

Kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sangat penting dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Tanpa dukungan yang memadai, korban penyalahgunaan narkoba cenderung sulit untuk memulihkan diri. Karena itu, Polres Pelabuhan Belawan perlu bekerja sama dengan keluarga dan lingkungan korban penyalahgunaan narkoba untuk memberikan dukungan yang memadai dalam proses pemulihan korban. Polres Pelabuhan Belawan dapat memberikan edukasi dan pelatihan kepada keluarga dan lingkungan korban penyalahgunaan narkoba tentang cara memberikan dukungan yang efektif bagi korban. Dengan adanya dukungan yang memadai, diharapkan proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba dapat berjalan lebih efektif.[[119]](#footnote-119)

1. Kurangnya Fasilitas yang Memadai

Kurangnya fasilitas yang memadai juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan. Fasilitas yang memadai, seperti tempat rehabilitasi yang nyaman dan aman, serta peralatan yang memadai, sangat penting dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Karena itu, Polres Pelabuhan Belawan perlu meningkatkan fasilitas yang tersedia untuk program *restorative justice* dan rehabilitasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas fasilitas yang sudah ada, seperti memperbaiki gedung rehabilitasi yang sudah ada, memperluas ruang lingkup layanan rehabilitasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf yang terlatih dan berkualitas.

1. Stigma Masyarakat terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba

Stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan. Stigma yang terbentuk di masyarakat, seperti pandangan negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba, dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program *restorative justice* dan rehabilitasi. Karena itu, Polres Pelabuhan Belawan perlu mengadakan kampanye untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, poster, dan brosur. Dengan adanya kampanye yang baik, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa korban penyalahgunaan narkoba bukanlah orang yang harus dikucilkan dari masyarakat, melainkan orang yang membutuhkan dukungan dan bantuan dari lingkungan sekitar untuk dapat memulihkan diri.[[120]](#footnote-120)

1. Kurangnya Ketersediaan Dana

Kurangnya ketersediaan dana juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan. Program *restorative justice* dan rehabilitasi membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat berjalan dengan lancar.

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program sangat penting untuk memastikan bahwa program *restorative justice* dan rehabilitasi yang diimplementasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program, seperti melalui forum-forum diskusi dan konsultasi dengan masyarakat. Selain itu, Polres Pelabuhan Belawan juga perlu memastikan adanya kesetaraan dan keadilan dalam penerapan program. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa program *restorative justice* dan rehabilitasi tidak diskriminatif dan tidak memihak pada pihak tertentu, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam program.[[121]](#footnote-121)

Terakhir, Polres Pelabuhan Belawan juga perlu menghormati hak-hak korban penyalahgunaan narkoba dalam pelaksanaan program *restorative justice* dan rehabilitasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa korban penyalahgunaan narkoba memiliki hak yang sama dengan pihak lain dalam proses peradilan dan rehabilitasi, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk dapat memulihkan diri dan membangun kehidupan yang lebih baik.

1. Upaya Polres Belawan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Di Pelabuhan Belawan, kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus korban penyalahgunaan narkoba. *Restorative justice* adalah pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak kejahatan. Sedangkan rehabilitasi adalah proses untuk memulihkan seseorang dari ketergantungan terhadap narkoba.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pengguna narkoba di wilayah mereka dan memastikan bahwa korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi tentang bahaya narkoba

Polres Pelabuhan Belawan melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, penggalangan dana, dan pemasangan spanduk dan poster di tempat-tempat umum. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

1. Program rehabilitasi

Polres Pelabuhan Belawan bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu korban narkoba agar dapat kembali ke kehidupan yang normal dan produktif.

1. Penerapan *restorative justice*

Polres Pelabuhan Belawan juga menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, serta memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Dalam penerapannya, *restorative justice* dilakukan melalui proses mediasi, yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.

1. Pelatihan keterampilan

Polres Pelabuhan Belawan memberikan pelatihan keterampilan kepada korban narkoba untuk membantu mereka memulihkan diri dan kembali ke kehidupan yang normal. Pelatihan keterampilan ini meliputi pelatihan keterampilan kerja, keterampilan sosial, dan keterampilan lain yang dapat membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi.

1. Pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah

Polres Pelabuhan Belawan juga melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sek olah. Hal ini dilakukan melalui program pendidikan dan sosialisasi kepada siswa-siswi tentang bahaya narkoba serta cara untuk menghindarinya. Program ini dilakukan untuk mencegah para siswa-siswi dari terjebak dalam penyalahgunaan narkoba dan juga untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang bahaya narkoba.

1. Kerja sama dengan masyarakat

Polres Pelabuhan Belawan juga menjalin kerja sama dengan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dapat memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang mencurigakan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, polisi akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

1. Pelaksanaan operasi penangkapan narkoba

Polres Pelabuhan Belawan juga melakukan operasi penangkapan narkoba yang bertujuan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Operasi ini dilakukan secara terencana dan terukur dengan mengandalkan intelijen dan teknologi modern.

Upaya Polres Pelabuhan Belawan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus korban penyalahgunaan narkoba menunjukkan hasil yang positif. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengguna narkoba di wilayah Pelabuhan Belawan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain itu, program rehabilitasi yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan juga berhasil membantu banyak korban narkoba untuk memulihkan diri dan kembali ke kehidupan yang normal. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Salah satu tantangan yang utama adalah peredaran narkoba yang semakin kompleks dan sulit untuk diberantas. Selain itu, masih ada stigma negatif terhadap korban narkoba yang seringkali membuat mereka sulit untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, Polres Pelabuhan Belawan perlu meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga rehabilitasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, peningkatan jumlah tenaga ahli dan fasilitas untuk rehabilitasi, serta penggunaan teknologi modern untuk mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba, partisipasi masyarakat sangatlah penting. Masyarakat harus menjadi mitra dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan memberikan informasi dan dukungan yang dibutuhkan oleh korban narkoba. Selain itu, masyarakat juga harus mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peran mereka dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.

Polres Pelabuhan Belawan perlu mengoptimalkan penggunaan media sosial dan platform online lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba dan upaya pencegahannya. Polres Pelabuhan Belawan dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba dan memberikan saran-saran tentang cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Polres Pelabuhan Belawan juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas operasi penangkapan narkoba. Salah satu contohnya adalah penggunaan sistem pengenalan wajah atau *facial recognition* untuk mengidentifikasi pelaku dan peredaran narkoba. Teknologi ini dapat membantu polisi untuk lebih cepat dan akurat dalam melakukan operasi penangkapan narkoba.[[122]](#footnote-122)

Untuk menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba, Polres Pelabuhan Belawan juga perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya. Salah satu lembaga yang dapat bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Belawan adalah Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) atau klinik rehabilitasi lainnya. Dengan bekerja sama dengan lembaga ini, Polres Pelabuhan Belawan dapat memberikan perawatan medis yang sesuai dan rehabilitasi yang efektif bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Kerja sama dengan lembaga swasta juga dapat membantu Polres Pelabuhan Belawan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Beberapa perusahaan dapat memberikan dukungan finansial atau fasilitas untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi korban penyalahgunaan narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi. Dalam hal ini, Polres Pelabuhan Belawan dapat mengajak dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sinergi yang positif dan efektif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Top of Form

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Setelah melalui analisis dan evaluasi yang mendalam, dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Penyidik berperan sebagai ujung tombak dalam proses penanganan kasus korban penyalahgunaan narkoba, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga upaya rehabilitasi. Selain itu, penyidik juga perlu terus berinovasi dalam mengembangkan metode dan strategi yang efektif dalam memperkuat upaya restorative justice dan rehabilitasi. Dengan demikian, penyidik dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan sejahtera;
2. Implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan, telah dilakukan berbagai upaya untuk memperkuat penegakan hukum, mengurangi risiko kriminalitas, serta memberikan perhatian pada korban dan masyarakat. Penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus penyalahgunaan narkoba merupakan langkah alternatif yang dapat membantu korban dan masyarakat dalam mengatasi masalah narkoba. Upaya tersebut masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada kasus penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan;
3. Penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan, penyidik menghadapi berbagai kendala dalam melakukan tugasnya. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi, minimnya dukungan dan fasilitas yang memadai, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya *restorative justice* dan rehabilitasi. Kendala-kendala tersebut tentu dapat menghambat efektivitas upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi penyidik, serta memperkuat kerjasama dengan masyarakat dan lembaga rehabilitasi untuk mendorong partisipasi mereka dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi. Dengan begitu, diharapkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
4. **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Peran penyidik sangat penting dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan. Untuk memperkuat upaya *restorative justice* dan rehabilitasi, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan bagi penyidik agar dapat memahami dengan baik teknis dan proses pelaksanaan restorative justice dan rehabilitasi. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat dan lembaga rehabilitasi, juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas upaya *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera;
2. Implementasi *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba perlu terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara pihak kepolisian, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi dalam mengembangkan program dan strategi yang lebih efektif dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas dan intensif kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan manfaat dari penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi. Dengan upaya yang terus ditingkatkan dan kolaborasi yang erat antara semua pihak terkait, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera;
3. Menghadapi kendala dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba di Polres Pelabuhan Belawan, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut agar upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan penyidik dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi melalui pelatihan dan pendidikan yang terarah. Selain itu, perlu adanya dukungan dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas penyidik. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga rehabilitasi dalam penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. 2002.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada, 2009.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ambarwati, Yeni, *Restorative Justice dalam Pespektif Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Azwar, M. Saifuddin, *Penegakan Hukum Restoratif di Indonesia: Telaah Yuridis dan Implementasinya di Lapangan*, Jakarta: Kencana Prenada, 2021.

Bruggink, JJH, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Cahyadi, Ahmad, *Restorative Justice: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016.

Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.

Fauzan, M. dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana: Jakarta, 2017

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Hall, Susan C., *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.

Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif),* Jakarta: Gaya Baru, 2006.

HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013.

Imron, Masyhuri dkk, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, 2022.

Jonkers, A.C., *Hukum Pidana Narkotika (edisi ke-2)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Kristanto, Dodi, *Dampak Narkotika pada Kesehatan Mental dan Fisik*, Jakarta: Kompas Media, 2019

Lanier, Mark M. dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.

Lestari, Eka, *Rekonstruksi Identitas Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994.

Martini, M., *Narkoba dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi*, Surabaya: Ghalia Indonesia, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

Nursyamsi, Asmaul, *Pemantauan dan Evaluasi dalam Program Rehabilitasi Korban Narkoba*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.

Pramudyo, Yosef Sigit, *Restirative Justice: Tinjauan Hukum dan Implementasinyadi Indonesia*, Yogyakarta: Sagung Seto, 2019.

Prasetya, B.A., *Teknologi Informasi dalam Pemberantasan Narkoba*, Jakarta: Pustaka Obor, 2018.

Putri, Resti, *Koordinasi Antara Penyidik dan Lembaga Rehabilitasi dalam Penerapan Restorative Justice pada Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: UGM Press, 2020.

Rachman, Abdi, *Strategi Peningkatan Anggaran Untuk Penerapan Restorative Justice di Indonesia,* Jakarta: UI Press, 2019.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.

Ratna, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

cetakan ke- 11, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Peranan Sosiologis Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers: Jakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sudarto, Budi, *Peraturan-peraturan Penting Tentang Narkotika*, Jakarta: Prenada, 2019.

Sudibyo, Ahmad, *Narkoba: Masalah dan Solusi*, Jakarta: Elex Media, 2015.

Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, 2004.

Sujanto, Adi, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Jakarta: Teraju, 2008.

Suprianto, Bambang, *Rehabilitasi Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2016.

Rizki, Devi Azwar, *Penegakan Hukum Restoratif dalam Konteks Pidana Narkoba di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2021.

Tamsyah, Sukmawati dkk, *Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice dan Rehabilitasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Obor, 2019.

UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, 2006.

Usman, Basyiruddin, *Media Pendidikan*, Ciputat Press: Jakarta, 2002.

Widayanti, Ria, *Rehabilitasi sebagai Pendekatan dalam Menangani Penyalahgunaan Narkotika*, Semarang: UNNES, 2017.

Widodo, Pranowo, *Bisnis Rehabilitasi Korban Narkotika: Sebuah Kajian Etika*, Jakarta: Kencana Prenada, 2017.

Wulan, S., *Restorative Justice: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Yuliani, Nia, *Holistik: Pendekatan Terpadu dalam Menangani Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2019.

**JURNAL**

Akbar, Muhammad, *Bisnis Rehabilitasi Korban Narkotika: Antara Keadilan Restoratif dan Komersialisasi,* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum dan Kriminal, Vol. 12, No. 1, 2018.

Amaliah, Rizky, *Penegakan Hukum Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Noken, Vol. 3, No. 2, 2020.

Anggraini, Lisdiana, *Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Perkara Pidana*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 1, 2021.

Astuti, Maria Dwi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Prioritas, Vol. 2, No. 2, 2019.

Darmawan, Denny, *Implementasi Restorative Justice pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2018.

Fitriani, R., *Peran Polisi dalam Pelaksanaan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 1, No.1, 2018.

Hendriyani, *Restorative Justice pada Kasus Narkoba di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Jurnal Ilmiah Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 5, No. 2, 2021.

Kurniawan, Anton, *Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Restorative Justice dan Rehabilitasi pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2018.

Mardiana, Y. dan A. Nurdin, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Restorative Justice*, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi, Vol. 17, No. 3, 2020.

Maulana, Ahmad, *Peran Komunitas dalam Rehabilitasi Korban dan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 8, No. 2, 2017.

Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan penelitian hukum pada majalah akreditasi, fakultas hukum USU, tanggal 18 Februari 2003.

Nurrohman, M., *Penerapan Pasal 103 UU Narkotika dalam Memberantas Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 4, No. 2, 2020.

Prasetya, R., *Implementasi Program Rehabilitasibagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Vol. 11, No. 1, 2020.

Rahayu, Sri dan Yeni Martiningrum, *Strategi Pengawasan dan Pendampingan dalam Proses Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba*, Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2019.

Rahayu, D.P. dan T.P. Susilowati, *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 1, 2016.

Rohman, F. dan A. Rochmah, *Kontribusi Masyarakat dalam Upaya Pemberdayaan Pasca Rehabilitasi Narkoba*, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Keberagaman, Vol. 2, No. 2, 2020.

Sari, Endah Lestari, *Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Narkoba di Polres Pelabuhan Belawan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19, No. 1, 2019.

Sari, R.K., *Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Implementasi Restorative Justice*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 21, No. 1, 2021.

Sinaga, Haposan Sahala Raja, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 7, Juli 2021.

Sholehuddin, *Konsep Sanksi Tindakan dan Sanksi Pidana dalam Menyelesaikan Masalah Narkotika*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 34, No. 2, 2004.

Supratikno, Hendarawan dkk, *Strategi Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 9, No. 1, 2014.

Suryanto, A., *Peran Pemerintah dalam Pengawasan Lembaga Rehabilitasi*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2017.

Tarmizi, Yulidar, *Implementasi Restorative Justice dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Polres Pelabuhan Belawan*, Jurnal Ilmiah Kajian Kepolisian, Vol. 3, No. 1, 2019.

Utomo, S.B., *Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum Prioritas, Vol. 1, No. 1, 2020.

**INTERNET**

https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/#:~:text=

sesuai%20dengan%20data%20yang%20ada,adalah%20kelompok%20usia%20remaja%2Fmuda.&text=Berdasarkan%20data%20dari%20Indonesia%20Drugs,dan%20dextro%206%2C4%25, diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 12:59 wib.

https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 13:39 WIB.

<http://www.ditjenpas.go.id/meretas-> kebijakan- asimilasi-bagi-narapidana, diakses pada 12 Desember 2022, pukul 18:00 WIB.

http://google.com/raypratama.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, Pukul 09:37 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\_Resor

Umbreit, Mark, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, [http://www.ojp.us-](http://www.ojp.us-doj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html) [doj/ovc/publications/infores/restorative\_justices/9523-family\_group/family3.html.](http://www.ojp.us-doj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html), 2001.

Coward, Sthepanie -Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?,* Horizons 15 Spring), http: web.infotrac.gale-group.com

Marshall, Tony, *Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate*, 1999, diakses dari website: http//[www.restorativejustice.org.](http://www.restorativejustice.org/), diakses pada tanggal 08 Maret 2023, pukul 10:23 WIB.

Wright, diakses dari website [http://www.restorativejustice.org](http://www.restorativejustice.org/) pada tanggal 08 Maret 2023, pukul 11.13 WIB.

Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan,*

[http://forumduniahukumblogku.wordpress.com,](http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/) diakses pada 08 Maret 2023, pukul 13.21 WIB.

https://puskeu.polri.go.id/informasi-publik/transparansi-anggaran, diakses pada tanggal 25 April 2023, Pukul 11:12 WIB.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU /SK/PS.oo/12/2020, Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

1. Haposan Sahala Raja Sinaga, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 7, Juli 2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. Masyhuri Imron dkk, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, 2022, hal. 67. [↑](#footnote-ref-2)
3. https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/#:~:text=

   sesuai%20dengan%20data%20yang%20ada,adalah%20kelompok%20usia%20remaja%2Fmuda.&text=Berdasarkan%20data%20dari%20Indonesia%20Drugs,dan%20dextro%206%2C4%25, diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 12:59 wib. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-7)
8. https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 13:39 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. Data Rekapitulasi Tindak Pidana Narkoba Tahun 2021 Khusus Satnarkoba Polres Pelabuhan Belawan. [↑](#footnote-ref-9)
10. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 3. [↑](#footnote-ref-10)
11. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana*, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/meretas-> kebijakan- asimilasi-bagi-narapidana, diakses pada 12 Desember 2022, pukul 18:00 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
12. JJH Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 216. [↑](#footnote-ref-12)
13. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 254. [↑](#footnote-ref-13)
14. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal 80. [↑](#footnote-ref-14)
15. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 129. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, Hal 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 2002, hal 9-10. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., hal 28. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ade Maman suherman, *Op.Cit*., hal. 6-11. [↑](#footnote-ref-19)
20. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada, 2009, hal 204. [↑](#footnote-ref-20)
21. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ke- 11, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hal. 8. [↑](#footnote-ref-21)
22. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013, hal. 301. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.*, hal 302. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*., hal. 303. [↑](#footnote-ref-25)
26. http://google.com/raypratama.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, Pukul 09:37 WIB. [↑](#footnote-ref-26)
27. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 375. [↑](#footnote-ref-27)
28. Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 8. [↑](#footnote-ref-28)
29. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*., hal. 307-308. [↑](#footnote-ref-29)
30. Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologis Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers: Jakarta, 2009, hal. 212-213. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisia Negara RI. [↑](#footnote-ref-31)
32. Basyiruddin Usman, *Media Pendidikan*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, hal. 24. [↑](#footnote-ref-32)
33. Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU /SK/PS.oo/12/2020, Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. [↑](#footnote-ref-33)
34. Pasal 1 angka 23 KUHAP. [↑](#footnote-ref-34)
35. Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 54., dalam Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, 2017, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 92. [↑](#footnote-ref-35)
36. M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana: Jakarta, 2017, hal. 339 [↑](#footnote-ref-36)
37. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-37)
38. https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\_Resor [↑](#footnote-ref-38)
39. Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 149-150. [↑](#footnote-ref-39)
40. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, 31. [↑](#footnote-ref-40)
41. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2001, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 153. [↑](#footnote-ref-41)
42. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 89-94. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-43)
44. Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, hal. 36. [↑](#footnote-ref-44)
45. Burhan Bungin, 2001, *Metodologi penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 133. [↑](#footnote-ref-45)
46. Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, hal. 191. [↑](#footnote-ref-46)
47. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hal. 161. [↑](#footnote-ref-47)
48. Burhan Ashofa, 1998, *Metode Penelitan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 20-21. [↑](#footnote-ref-48)
49. Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, [http://www.ojp.us-](http://www.ojp.us-doj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html) [doj/ovc/publications/infores/restorative\_justices/9523-family\_group/family3.html.](http://www.ojp.us-doj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html), 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004, hal. 332 dan 407-408. [↑](#footnote-ref-49)
50. Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?,* Horizons 15 Spring), http: web.infotrac.gale-group.com; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hal. 332 dan 365. [↑](#footnote-ref-50)
51. Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate*, 1999, hal. 5, diakses dari website: http//[www.restorativejustice.org.](http://www.restorativejustice.org/), diakses pada tanggal 08 Maret 2023, pukul 10:23 WIB. [↑](#footnote-ref-51)
52. Wright, 1991 hal. 117 diakses dari website [http://www.restorativejustice.org](http://www.restorativejustice.org/) pada tanggal 08 Maret 2023, pukul 11.13 WIB. [↑](#footnote-ref-52)
53. UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, 2006, hal. 5. [↑](#footnote-ref-53)
54. Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan,*

    [http://forumduniahukumblogku.wordpress.com,](http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/) diakses pada 08 Maret 2023, pukul 13.21 WIB. [↑](#footnote-ref-54)
55. Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hal. 4. [↑](#footnote-ref-55)
56. Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hal. 1. [↑](#footnote-ref-56)
57. Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif),* Jakarta: Gaya Baru, 2006, hal. 134. [↑](#footnote-ref-57)
58. Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 10. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-59)
60. Adi Sujanto, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Jakarta: Teraju, 2008, hal. 123. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid.*, hal. 85. [↑](#footnote-ref-61)
62. Hendarawan Supratikno dkk, *Strategi Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 9, No. 1, 2014, hal. 16-23. [↑](#footnote-ref-62)
63. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-63)
64. D.P. Rahayu dan T.P. Susilowati, *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 1, 2016, hal. 60-77. [↑](#footnote-ref-64)
65. M. Saifuddin Azwar, *Penegakan Hukum Restoratif di Indonesia: Telaah Yuridis dan Implementasinya di Lapangan*, Jakarta: Kencana Prenada, 2021, hal. 45-47. [↑](#footnote-ref-65)
66. R. Fitriani, *Peran Polisi dalam Pelaksanaan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 1, No.1, 2018, hal. 23-32. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-67)
68. Rizky Amaliah, *Penegakan Hukum Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Noken, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 112-124. [↑](#footnote-ref-68)
69. R. Fitriani, *Op.Cit*. [↑](#footnote-ref-69)
70. Devi Azwar Rizki, *Penegakan Hukum Restoratif dalam Konteks Pidana Narkoba di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hal. 67. [↑](#footnote-ref-70)
71. Budi Sudarto, *Peraturan-peraturan Penting Tentang Narkotika*, Jakarta: Prenada, 2019, hal. 89. [↑](#footnote-ref-71)
72. Ratna, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2017, hal. 129. [↑](#footnote-ref-72)
73. A.C. Jonkers, *Hukum Pidana Narkotika (edisi ke-2)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 32-33. [↑](#footnote-ref-73)
74. Sholehuddin, *Konsep Sanksi Tindakan dan Sanksi Pidana dalam Menyelesaikan Masalah Narkotika*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 34, No. 2, 2004, hal. 28-37. [↑](#footnote-ref-74)
75. M. Nurrohman, *Penerapan Pasal 103 UU Narkotika dalam Memberantas Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 65-77. [↑](#footnote-ref-75)
76. R. Fitriani, *Op.Cit*. [↑](#footnote-ref-76)
77. S.B. Utomo, *Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum Prioritas, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 1-15. [↑](#footnote-ref-77)
78. Hendriyani, *Restorative Justice pada Kasus Narkoba di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Jurnal Ilmiah Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 5, No. 2, 2021, hal. 147-158. [↑](#footnote-ref-78)
79. Ahmad Cahyadi, *Restorative Justice: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hal. 88. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Ibid.*, hal. 96. [↑](#footnote-ref-80)
81. Hendriyani, *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-81)
82. Denny Darmawan, *Implementasi Restorative Justice pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2018, hal. 43-56. [↑](#footnote-ref-82)
83. S. Wulan, *Restorative Justice: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016, hal. 87. [↑](#footnote-ref-83)
84. Asmaul Nursyamsi, *Op.Cit.*, hal. 59. [↑](#footnote-ref-84)
85. Lisdiana Anggraini, *Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Perkara Pidana*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 1, 2021, hal. 63-80. [↑](#footnote-ref-85)
86. Yeni Ambarwati, *Restorative Justice dalam Pespektif Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gama Media, 2017, hal. 79. [↑](#footnote-ref-86)
87. Ibid. [↑](#footnote-ref-87)
88. Dodi Kristanto, *Dampak Narkotika pada Kesehatan Mental dan Fisik*, Jakarta: Kompas Media, 2019, hal. 91 [↑](#footnote-ref-88)
89. Nia Yuliani, *Holistik: Pendekatan Terpadu dalam Menangani Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2019, hal. 82. [↑](#footnote-ref-89)
90. https://puskeu.polri.go.id/informasi-publik/transparansi-anggaran, diakses pada tanggal 25 April 2023, Pukul 11:12 WIB. [↑](#footnote-ref-90)
91. Sumber Polres Pelabuhan Belawan. [↑](#footnote-ref-91)
92. Bambang Suprianto, *Rehabilitasi Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hal. 77. [↑](#footnote-ref-92)
93. *Ibid*., hal. 79. [↑](#footnote-ref-93)
94. Ria Widayanti, *Rehabilitasi sebagai Pendekatan dalam Menangani Penyalahgunaan Narkotika*, Semarang: UNNES, 2017, hal. 110. [↑](#footnote-ref-94)
95. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-95)
96. Eka Lestari, *Rekonstruksi Identitas Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hal. 87. [↑](#footnote-ref-96)
97. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-97)
98. Sri Rahayu dan Yeni Martiningrum, *Strategi Pengawasan dan Pendampingan dalam Proses Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba*, Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2019, hal. 95. [↑](#footnote-ref-98)
99. Resti Putri, *Koordinasi Antara Penyidik dan Lembaga Rehabilitasi dalam Penerapan Restorative Justice pada Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: UGM Press, 2020, hal. 105. [↑](#footnote-ref-99)
100. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-100)
101. Pranowo Widodo, *Bisnis Rehabilitasi Korban Narkotika: Sebuah Kajian Etika*, Jakarta: Kencana Prenada, 2017, hal. 53. [↑](#footnote-ref-101)
102. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-102)
103. Muhammad Akbar, *Bisnis Rehabilitasi Korban Narkotika: Antara Keadilan Restoratif dan Komersialisasi,* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum dan Kriminal, Vol. 12, No. 1, 2018, hal 1-18. [↑](#footnote-ref-103)
104. Nia Yuliani, *Op.Cit*., hal. 95. [↑](#footnote-ref-104)
105. Abdi Rachman, *Strategi Peningkatan Anggaran Untuk Penerapan Restorative Justice di Indonesia,* Jakarta: UI Press, 2019, hal. 108. [↑](#footnote-ref-105)
106. R.K. Sari, *Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Implementasi Restorative Justice*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 21, No. 1, 2021, 72-86. [↑](#footnote-ref-106)
107. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-107)
108. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-108)
109. Resti Putri, *Op.Cit.*, hal. 114. [↑](#footnote-ref-109)
110. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-110)
111. A. Suryanto, *Peran Pemerintah dalam Pengawasan Lembaga Rehabilitasi*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2017, hal. 78-85. [↑](#footnote-ref-111)
112. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-112)
113. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-113)
114. Anton Kurniawan, *Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Restorative Justice dan Rehabilitasi pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 145-157. [↑](#footnote-ref-114)
115. Ahmad Maulana, *Peran Komunitas dalam Rehabilitasi Korban dan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 8, No. 2, 2017, hal. 153-164. [↑](#footnote-ref-115)
116. Ahmad Sudibyo, *Narkoba: Masalah dan Solusi*, Jakarta: Elex Media, 2015, hal. 132-133. [↑](#footnote-ref-116)
117. F. Rohman dan A. Rochmah, *Kontribusi Masyarakat dalam Upaya Pemberdayaan Pasca Rehabilitasi Narkoba*, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Keberagaman, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 105-115. [↑](#footnote-ref-117)
118. Anton Kurniawan, *Loc.Cit.*, hal. 145-157. [↑](#footnote-ref-118)
119. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-119)
120. M. Martini, *Narkoba dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi*, Surabaya: Ghalia Indonesia, 2018, hal. 21. [↑](#footnote-ref-120)
121. Y. Mardiana dan A. Nurdin, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Restorative Justice*, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi, Vol. 17, No. 3, 2020, hal. 207-214. [↑](#footnote-ref-121)
122. B.A. Prasetya, *Teknologi Informasi dalam Pemberantasan Narkoba*, Jakarta: Pustaka Obor, 2018, hal. 45-47. [↑](#footnote-ref-122)